



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) POLDA SULTRA TAHUN 2024

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Kepolisian Daerah Sultra mempunyai kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepolisian Daerah Sultra Tahun 2024 tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian kinerja dan sasaran yang telah diprogramkan oleh Polda Sultra dalam T.A. 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Polda Sultra Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Strategis Polda Sultra Tahun 2020-2024 yang pelaksanaannya diimplementasikan dalam perjanjian kinerja Polda Sultra T.A. 2024. Kepolisian Daerah Sultra merupakan unsur pelaksana utama Polri di kewilayahan yang berkedudukan di bawah Kapolri, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi-fungsi Polri dan pengembalian fungsi kepolisian lainnya dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif bagi kepentingan masyarakat.

#### B. TUGAS .....



## B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah, maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah Sultra adalah sebagai berikut:

### 1. Tugas Pokok

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024, tugas pokok Polri adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. melaksanakan tugas – tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Polda bertugas:

- a. melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Polda Sultra menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan guna pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;

c. penyelidikan .....

- 
- c. penyelidikan, penyidikan, identifikasi, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
  - d. pelaksanaan Samapta kepolisian dan satwa kepolisian;
  - e. pengamanan objek vital;
  - f. pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum lalu lintas, pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
  - g. pelaksanaan kepolisian perairan dan udara, yang meliputi kegiatan patroli perairan dan udara, pembinaan masyarakat perairan dan potensi dirgantara serta penegakan hukum di perairan;
  - h. pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan pengamanan swakarsa, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus serta satuan pengamanan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Perkembangan organisasi Polri didasari dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, maka struktur organisasi Polri khususnya di tingkat kewilayahan disusun berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah sebagai berikut:

1. Markas Kepolisian Daerah Sultra, disingkat Mapolda Sultra.
  - a) unsur pimpinan:
    - 1) Kapolda;
    - 2) Wakapolda.

b) unsur .....



b) unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan:

- 1) Itwasda;
- 2) Roops;
- 3) Rorena;
- 4) Ro SDM;
- 5) Rolog;
- 6) Bidpropam;
- 7) Bidhumas;
- 8) Bidkum;
- 9) Bid TIK;
- 10) Spripim;
- 11) Setum;
- 12) Yanma.

c) unsur pelaksana tugas pokok:

- 1) SPKT;
- 2) Ditintelkam;
- 3) Ditreskrimum;
- 4) Ditreskrimsus;
- 5) Ditressiber;
- 6) Ditresnarkoba;
- 7) Ditbinmas;
- 8) Ditsamapta;
- 9) Ditlantas;
- 10) Ditpamobvit;
- 11) Ditpolairud;
- 12) Dittahti;
- 13) Satbrimob.

d) unsur pendukung:

- 1) SPN;
- 2) Bidkeu;
- 3) Biddokkes;

2. Kepolisian .....

- 
2. Kepolisian Resor, disingkat Polres terdiri dari:
    - a) Kepolisian Resor Kota Kendari;
    - b) Kepolisian Resor Konawe;
    - c) Kepolisian Resor Kolaka;
    - d) Kepolisian Resor Muna;
    - e) Kepolisian Resor Baubau;
    - f) Kepolisian Resor Buton;
    - g) Kepolisian Resor Konawe Selatan;
    - h) Kepolisian Resor Bombana;
    - i) Kepolisian Resor Kolaka Utara;
    - j) Kepolisian Resor Wakatobi;
    - k) Kepolisian Resor Konawe Utara;
    - l) Kepolisian Resor Buton Utara;
    - m) Kepolisian Resor Kolaka Timur;
    - n) Kepolisian Resor Buton Tengah.

Terdapat permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi khususnya permasalahan di bidang keamanan yang berpotensi menyebabkan timbulnya gangguan keamanan antara lain:

1. rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum hal ini sangat mempengaruhi situasi keamanan, sehingga pelanggaran hukum dianggap biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan aparat setempat;
2. masih berkembangnya pemahaman ditengah tengah masyarakat bahwa tanggung jawab keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan di lingkungannya;
3. rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan/pelanggaran sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku;
4. kecenderungan masyarakat Sultra mengkonsumsi minuman keras sehingga berakibat timbulnya suatu kejahatan, mudah emosional, mudah tersinggung, dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah sehingga mengakibatkan sering terjadinya tindak kekerasan seperti penganiayaan, pengeroyokan, KDRT dan tindakan asusila;

5. terbatasnya .....

- 
5. terbatasnya lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi terbatas beban biaya hidup yang semakin tinggi serta minimnya keterampilan, membuat orang atau kelompok tertentu berpikiran pendek mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang melalui cara-cara yang melawan hukum;
  6. sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah keamanan segalanya dapat diatur dan ditentukan adat setempat, sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal;
  7. kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan dan rambu rambu lalu lintas, kelalaian korban yang kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya, kondisi kedaraan dan jalan serta pengaruh cuaca melatarbelakangi terjadinya kecelakaan;
  8. menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap wibawa penegakan hukum yang disebabkan karena tindakan aparat penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku yang ditandai dengan pengungkapan kasus suap beberapa aparat penegak hukum. Kondisi tersebut telah membuat stigma negatif bahwa hukum menjadi tajam hanya ketika berhadapan dengan masyarakat kalangan bawah;
  9. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin mengganggu stabilitas dan keamanan nasional;
  10. Hegemoni (bentuk kekuasaan) demokrasi telah menimbulkan potensi konflik pada masyarakat;
  11. media sosial pun sering digunakan untuk menyebarkan hoax dan kebencian yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional;
  12. penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;
  13. adanya potensi bencana alam di Sulawesi Tenggara yang membutuhkan kesiapsiagaan di dalamnya saat terjadi bencana;
  14. masyarakat dan *stakeholders* masih belum merasakan bahwa Kamtibmas dan penegakan hukum adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Polda Sultra;
  15. tuntutan masyarakat akan rasa keadilan semakin tinggi dan harapan untuk *restorative justice* tidak terpenuhi sehingga dapat menjauhkan masyarakat dari Polri;

16. pesta .....

- 
16. pesta demokrasi Pilkada menimbulkan polarisasi antar pendukung yang dapat menyebabkan ketegangan sosial sehingga Polri serentak seluruh Indonesia melakukan penggelaran Operasi Mantap Praja untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama berlangsungnya pesta demokrasi.

#### **D. SISTIMATIKA PENYAJIAN**

BAB I Pendahuluan, memuat penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

BAB II Perencanaan kinerja, memuat tentang ringkasan ikhtisar perjanjian kinerja;

BAB III Akuntabilitas kinerja, memuat tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran;

BAB IV Penutup, memuat tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran :

1. Perjanjian kinerja Polda Sultra tahun 2024;
2. Dokumentasi;
3. Sprin tim Pokja penyusunan LKIP Polda Sultra tahun 2024 dan Sprin reviu.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polda Sultra agar efektif, efisien dan akuntabel, maka Polda Sultra berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

#### A. RENCANA STRATEGIS POLDA SULTRA TAHUN 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) Polda Sultra tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Tahun 2024 adalah tahun kelima atau tahun terakhir untuk pelaksanaan Renstra Polda Sultra tahun 2020-2024. Secara substantif rencana strategis Polda Sultra memuat visi dan misi, tujuan yang ingin dicapai, sasaran prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

##### 1. Visi.

Visi Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara:

*"Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman dan tertib."*

Yang memiliki makna terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Polri dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

##### 2. Misi.

Mengacu pada beberapa pengertian di atas, maka Polda Sultra menetapkan misi organisasi sampai dengan tahun 2024, yaitu:

*"Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat."*

Dalam mewujudkan visi Polda Sultra, maka 3 (tiga) hal inilah yang harus dilakukan.

Oleh .....



Oleh karena itu, misi Polda Sultra tersebut memiliki makna sebagai berikut:

**Melindungi.** Dalam hal melindungi, banyak hal yang memerlukan perlindungan. Tetapi Polda Sultra bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**Mengayomi.** Polisi selalu berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik pada masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jika apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi semaksimal mungkin kalau dari kemauan masyarakat itu sendiri kurang, maka akan percuma saja apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi. Dan masyarakat akan terus berfikir bahwa seorang polisi tidak bisa mengayomi masyarakat.

**Melayani.** Melayani kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

### 3. Tujuan.

- a. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara;
- b. menegakkan hukum secara berkeadilan;
- c. mewujudkan personel Polda Sultra yang profesional;
- d. modernisasi pelayanan Polda Sultra;
- e. menerapkan manajemen Polri yang terintegritas dan terpercaya.

### 4. Sasaran Strategis.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan *impact/outcome* dari program-program yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian. Metode *balanced scorecard* merupakan dasar penyusunan peta strategi yang terbagi menjadi menjadi 3 (tiga) perspektif yakni *stakeholder perspective*, *internal process perspective* dan *innovation perspective*.

Keterkaitan .....

Keterkaitan sasaran *impact* "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", Tujuan, dan Sasaran Strategis:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum secara berkeadilan.	Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan.
3. Mewujudkan personel Polda Sultra yang profesional.	Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional.
4. Modernisasi pelayanan Polda Sultra.	Modernisasi teknologi Polda Sultra.
5. Menerapkan manajemen kepolisian yang terintegritas dan terpercaya.	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

#### 5. Rencana Capaian Target Sasaran Strategis:

##### a. Indikator Kinerja *Impact*

**Sasaran *Impact*** : Keamanan dan Ketertiban Provinsi Sultra

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Keamanan dan Ketertiban Provinsi Sultra	3.41	3.43	3,52	3,75	3,77

##### b. Indikator Kinerja Utama

**Sasaran Strategis 1:** Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban.	51.7	52.2	54.9	75.10	74.5

Sasaran .....

**Sasaran Strategis 2:** Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Penegakan Hukum.	89.1	89.4	89.96	74.75	77.5

c. Indikator Kinerja Pendukung:

**Sasaran Strategis 3:** Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional.

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra;	54.8	55.2	56.4	57.7	59.5
2.	Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Sultra.	90.8	91.5	91.6	91.8	91.9

**Sasaran Strategis 4:** Modernisasi teknologi Polda Sultra

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase perawatan Alkom;	62	63	65	70	75
2.	Persentase perawatan Almatsus.	62	63	65	70	75
3.	Persentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus	62	63	65	70	75

**Sasaran Strategis 5:** Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

NO	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai SAKIP;	76.20	77.30	78.45	79.50	80.20
2.	Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra.	76.8	77.8	80.1	81.2	82.1

3. Nilai .....

3.	Nilai kinerja anggaran.	89.6	89.8	90.1	90.3	90.6
4.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	92	92	92	93	93
5.	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra	93	93	94	94	95

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *reviu* atas laporan kinerja instansi pemerintah merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyusunan penetapan kinerja di lingkungan Polri. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. sebagai .....

4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Polda Sultra telah membuat perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian kinerja Polda Sultra tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024 yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Perjanjian kinerja dibuat oleh seluruh Kasatker jajaran Polda Sultra yang merupakan kesepakatan kinerja antara Kapolda Sultra selaku atasan dan Kasatker selaku bawahan. Perjanjian kinerja dimaksud berisi tekad atau janji untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan harapan akan dapat meningkatkan kinerja Polda Sultra.

Perjanjian kinerja tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran strategis maupun indikator kinerja dengan tujuan utama untuk mewujudkan pelayanan prima, baik dalam rangka Harkamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Sasaran strategis itu diterapkan dengan cara mengembangkan kemampuan personel Polda Sultra guna mewujudkan SDM Polri yang profesional, bermoral, humanis, simpatik dan dipercaya masyarakat. Di samping itu dalam menghadapi berbagai *trend* kejahatan yang terus berkembang akibat semakin canggihnya modus kejahatan perlu dilakukan antisipasi melalui upaya deteksi dini yang didukung dengan peralatan teknologi kepolisian yang memadai.

Perjanjian kinerja Polda Sultra tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN <i>IMPACT</i>	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Keamanan dan ketertiban Provinsi Sultra	Indeks keamanan dan ketertiban Provinsi Sultra	74.5

SASARAN .....

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.	Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	74.5
Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan.	Indeks Penegakan Hukum.	77.5
Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional	Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra	59.5
	Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Sultra	91.9
Modernisasi teknologi Polda Sultra	Persentase perawatan Alkom;	75
	Persentase perawatan Almatsus;	75
	Persentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus.	75
Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.	Nilai SAKIP	80.20
	Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra	82.1
	Nilai kinerja anggaran	90.6
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	93
	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra	95

### C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja tahun 2024, ditetapkan rencana kerja dan anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 5 (lima) program sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Profesionalisme SDM Polri	43.598.377.000,-
2.	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	71.971.899.000,-
3.	Modernisasi Almatsus	135.359.364.000,-
4.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	286.057.342.000,-
5.	Dukungan manajemen	510.430.093.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>1.047.417.075.000,-</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA POLDA SULTRA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan indikator dalam pencapaian kinerja. Secara garis besar dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) untuk tahun 2024 dari segi *output* seluruhnya telah dapat dilaksanakan sedangkan dari segi *outcome* masih ada beberapa indikator belum dapat tercapai sesuai target.

Dalam melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator sasaran, maka ditetapkan kriteria penilaian, yaitu:

NO	CAPAIAN KINERJA		KRITERIA CAPAIAN
1	Nilai	80 s/d 100 %	Sangat berhasil
2	Nilai	70 s/d 80 %	Berhasil
3	Nilai	60 s/d 70 %	Cukup berhasil
4	Nilai	Kurang dari 60 %	Tidak berhasil

Sumber: Modul 1 Evaluasi atas implementasi SAKIP perencanaan dan pengukuran kinerja.

Pada Renstra Polda Sultra tahun 2020-2024 terdapat 1 sasaran *Impact* dan 5 sasaran strategis serta 13 Indikator kinerja yang menjadi target kinerja Polda Sultra. Dari 13 indikator kinerja tersebut, 12 indikator dinyatakan “berhasil” (mencapai target) dan 1 indikator “belum berhasil” (tidak mencapai target).

Polda Sultra memiliki banyak indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan atau dilaporkan, oleh sebab itu sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja Polda Sultra cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama dari tugas dan fungsi sebagai kriteria keberhasilan kinerja Polda Sultra, dimana capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel akan memberikan gambaran tentang sejauh mana Polda Sultra dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diemban.

Indikator .....

Indikator kinerja yang dirumuskan diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak untuk kepentingan tentang hasil capaian indikator kinerja yang diwujudkan oleh Polda Sultra, capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah diprogramkan adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN <i>IMPACT</i>	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REA LI SASI	%
1	Keamanan dan Ketertiban Provinsi Sultra	Indeks keamanan dan ketertiban Provinsi Sultra	3.77	4.13	109.55 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REA LI SASI	%
1.	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.	Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	74.5	80.41	107.93 %
2.	Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan	Indeks Penegakan Hukum	77.5	85.37	110.15 %
3.	Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional.	Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra	59.5	87.12	146.42 %
		Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Sultra	91.9	93.92	102.20 %
4.	Modernisasi Teknologi Polda Sultra	Persentase Perawatan Alkom	75	93.38	124.51 %
		Persentase Perawatan Almatsus	75	98.36	131.15 %
		Persentase Pemenuhan ADK pada Almatsus	75	100	133.33 %

5.	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.	Nilai SAKIP	80.20	79.12	98.65 %
		Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra;	82.1	93.14	113.4 5%
		Nilai kinerja anggaran	90.6	91.34	100.8 2%
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	93	97.4	103.5 %
		Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra	95	99.4	104,6 %

Adapun capaian kinerja Polda Sultra tahun 2024 untuk setiap indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan.

## **SI** **KEAMANAN DAN KETERTIBAN PROVINSI SULTRA**

Menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Sultra merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang baik. Salah satu bagian terpenting dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Sultra adalah peran serta masyarakat, dalam hal ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk sistem keamanan lingkungan.

Kepolisian .....

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam kategori keamanan yang menjadi tugas kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Pengaturan dalam pasal 30 ayat 4 menampakan adanya “Dwi Fungsi” tugas Kepolisian yaitu sebagai alat keamanan dan penegak hukum. Sebagai alat keamanan, Kepolisian bertugas menjaga dan menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum. Sebagai alat penegak hukum, Kepolisian bertugas menyelidiki dan menyidik tindak pidana sebagai bagian dari sistem penegakan hukum.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Keamanan dan Ketertiban Provinsi Sultra	3.77	4.13	109.55%

Indeks Kamtibmas adalah suatu indikator yang mengukur kinerja institusi Polri secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dari dua dimensi pembentuk Indeks Kamtibmas yaitu Indeks Harkamtibmas (bobot 56%) dan Indeks Gakkum Polri (bobot 44%).

Indikator Kinerja	Indeks Kamtibmas	
	<b>Formula</b>	<b>Karakteristik Indikator Kinerja</b>
	$IK = (W_{IH} \times \frac{IH}{20}) + (W_{IG} \times \frac{IG}{20})$	
<b>IK</b>	Indeks Kamtibmas	<b>Satuan Pengukuran</b>
<b>IH</b>	Indeks Harkamtibmas	<i>Indeks</i>
<b>IG</b>	Indeks Gakkum Polri	<b>Dimensi</b>
<b>W<sub>IH</sub></b>	Bobot Indeks Harkamtibmas (56%)	Harkamtibmas dan Gakkum
<b>W<sub>IG</sub></b>	Bobot Indeks Gakkum (44%)	<b>Sumber Data</b>
		Ditlantas, Ditbinmas, Ditsamapta, Ditpolair, Ditpamobvit, Satbrimob, Diintekam, Roops, Ditreskrim, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba.

Distribusi Skor per Level Kinerja		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Kamtibmas	TW1	1,0 - < 2,0	2,0- < 3,0	3,0- < 4,0	4,0- < 4,5	4,5- < 5,0
	TW2	1,0 - < 2,0	2,0- < 3,0	3,0- < 4,0	4,0- < 4,5	4,5- < 5,0
	TW3	1,0 - < 2,0	2,0- < 3,0	3,0- < 4,0	4,0- < 4,5	4,5- < 5,0
	TW4	1,0 - < 2,0	2,0- < 3,0	3,0- < 4,0	4,0- < 4,5	4,5- < 5,0

Untuk pencapaian indikator kinerja pada indeks keamanan dan ketertiban Provinsi Sultra untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,77 dan terealisasi sebesar 4,13 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 109.55%.

Dalam penilaian indeks keamanan dan ketertiban Provinsi Sultra tahun 2024, ada dua dimensi penilaian yaitu:

1. dimensi Harkamtibmas; dan
2. dimensi penegakkan hukum.

Dibawah ini adalah hasil penilaian indeks keamanan dan ketertiban Provinsi Sultra:

DIMENSI	NILAI INDEKS
Indeks Harkamtibmas	80.41
Indeks Penegakkan Hukum	85.37
Indeks Keamanan dan Ketertiban Provinsi Sultra	4.13



Jika .....

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA: Indeks Keamanan dan Ketertiban Provinsi Sultra		
TAHUN	REALISASI	CAPAIAN
2020	3.44	101.2%
2021	3.95	101.3%
2022	3.54	100.57%
2023	3.76	100.27%
2024	4,13	109.55%

Indikator kinerja indeks keamanan dan ketertiban Provinsi Sultra tahun 2024 mencapai 4,13 dengan tingkat capaian sebesar 109,55% sedangkan tahun 2023 tercapai sebesar 3,76 dengan tingkat capaian sebesar 100,27%.



Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target 2024 (Akhir Renstra)	%
Indeks Keamanan dan Ketertiban Provinsi Sultra	4.13	3.77	109.55%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024, indikator kinerja indeks keamanan dan ketertiban Provinsi Sultra tercapai sebesar 4,13 dan telah mencapai target untuk tahun akhir Renstra (2024).

Perbandingan realisasi kinerja indeks keamanan dan ketertiban Provinsi Sultra tahun 2024 yaitu target tahun 2024, realisasi tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
3.77	4.13	3.76	3.77

Untuk mencapai target, Polda Sultra melaksanakan penegakan hukum lebih proaktif memberikan kenyamanan dalam melayani masyarakat baik dari segi sarana prasarana maupun dari kualitas SDM yang berkompeten.

## SS. 1

### **TERWUJUDNYA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

Keamanan adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Keamanan masyarakat dalam rangka Kamtibmas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat yaitu:

1. perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis;
2. adanya rasa kepastian hukum dan rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan serta ketakutan;
3. perasaan dilindungi dari segala macam bahaya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalamnya menjelaskan bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat merupakan tugas dari Polri, maka dari itu Polri menciptakan berbagai kebijakan dan strategi untuk dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat demi menunjang pembangunan nasional.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
<b>Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban</b>	<b>74.5</b>	<b>80.41</b>	<b>107.93%</b>

Indeks Harkamtibmas mengukur kinerja Polda Sultra untuk melakukan upaya pemeliharaan Kamtibmas serta pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Indeks Harkamtibmas dihitung dari rata-rata bobot dari 8 (delapan) indikator kinerja pembentuk dimensi Harkamtibmas.

Untuk pencapaian indikator kinerja pada indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 74,5 dan terealisasi sebesar 80,41 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 107,93%.

Dalam penilaian indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban tahun 2024, ada delapan sasaran penilaian yaitu:

1. *road safey* indeks;
2. indeks *community policing*;
3. *response time* kehadiran polisi di TKP;
4. tingkat keamanan di jalur perairan Sultra;
5. persentase pemenuhan pengamanan objek vital dan target rentan;

6. tingkat .....

6. tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. persentase kemampuan reduksi potensi gangguan;
8. *crime rate*.

Indikator Kinerja	Indeks Harkamtibmas	
<b>Formula</b>		<b>Karakteristik Indikator Kinerja</b>
$IH = 20X \left( \sum_{i=1}^8 W_i X_i \right)$		
<b>IH</b>	: Indeks Harkamtibmas	<b>Satuan Pengukuran</b>
<b>X<sub>1</sub> s.d. X<sub>8</sub></b>	: Nilai indeks masing indikator kinerja dalam dimensi Harkamtibmas	<i>Indeks</i>
<b>W<sub>1</sub> s.d. W<sub>8</sub></b>	: Bobot masing-masing indikator kinerja dalam Dimensi Harkamtibmas	<b>Dimensi</b>
Catatan: Adanya pengali berupa konstanta 20 mengingat Indeks Kamtibmas menggunakan skala 1-5, sedangkan Indeks Harkamtibmas dan Gakkum Polri menggunakan skala 1-100;		Harkamtibmas
		<b>Sumber Data</b>
		Ditlantas, Ditsamapta, Ditpamobvit, Diintelkam, Roops Ditbinmas, Ditpolair, Satbrimob,

Distribusi Skor per Level Kinerja		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Harkamtibmas	TW1	20- < 40	40- < 60	60- < 80	80- < 90	90- < 100
	TW2	20- < 40	40- < 60	60- < 80	80- < 90	90- < 100
	TW3	20- < 40	40- < 60	60- < 80	80- < 90	90- < 100
	TW4	20- < 40	40- < 60	60- < 80	80- < 90	90- < 100

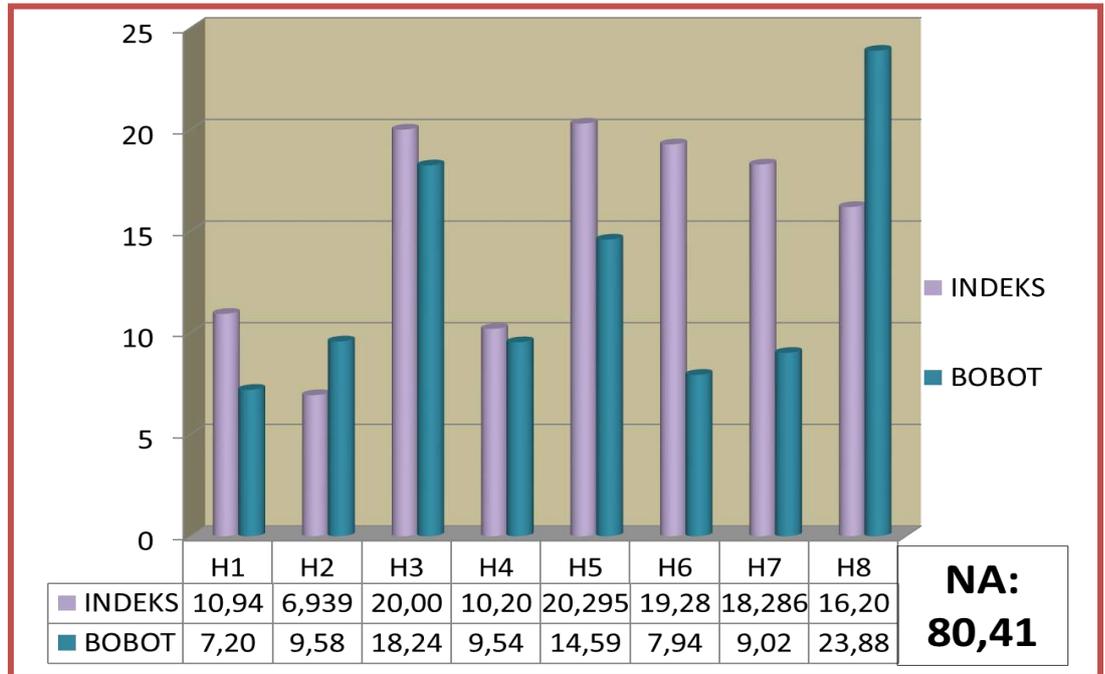
Nilai sasaran pada indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel .....

**Tabel**  
**Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban tahun 2024**

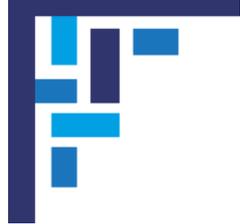
Indikator Kinerja		Indeks TW1	Indeks TW2	Indeks TW3	Indeks TW4	Bobot
Harkamtibmas	H1 Road Safey Index	2,51	2,74	2,81	2,881	7,20%
	H2 Indeks Community Policing	1,00	1,71	2,31	1,919	9,58%
	H3 Response time kehadiran polisi di TKP	5,00	5,00	5,00	5,000	18,24%
	H4 Tingkat keamanan di jalur perairan Indonesia	1,00	4,16	1,00	4,037	9,54%
	H5 Persentase pemenuhan pengamanan obyek vital dan target rentan	5,00	5,00	5,00	5,299	14,59%
	H6 Tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masy	5,00	5,00	4,28	5,000	7,94%
	H7 Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan	4,76	4,43	4,10	5,000	9,02%
	H8 Crime rate	2,27	4,60	4,62	4,712	23,88%

**GRAFIK INDEKS HARKAMTIBMAS 2024**



Data diatas menunjukkan bahwa nilai indeks Harkamtibmas Polda Sultra dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 selama tahun 2024 telah mencapai nilai 80.41, data score 80.41 tersebut diperoleh dari perkalian nilai indeks tahun 2024 dengan nilai total bobot dari delapan indikator kinerja indeks Harkamtibmas. Indeks Harkamtibmas pada indikator persentase pemenuhan pengamanan objek vital dan target rentan (H5) menduduki urutan pertama dengan nilai 20,295, indikator

response ...



*response time* kehadiran polisi di TKP (H3) menduduki urutan kedua dengan nilai 20,00 dan persentase tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (H6) menduduki urutan ketiga dengan nilai 19.28.

Di bawah ini adalah indikator indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tenggara tahun 2024:

1. *Road Safety* Indeks

Keselamatan jalan adalah upaya dalam penanggulangan kecelakaan yang terjadi di jalan yang tidak hanya disebabkan oleh faktor kondisi kendaraan maupun pengemudi, namun disebabkan pula oleh banyak faktor lain. Faktor-faktor lain tersebut meliputi kondisi alam, desain ruas jalan (*alinyemen vertikal atau horizontal*), jarak pandang pengemudi, kondisi pengerasan jalan, kelengkapan rambu atau petunjuk jalan, pengaruh budaya dan pendidikan masyarakat, peraturan atau kebijakan tingkat lokal yang berlaku dapat secara tidak langsung memicu terjadinya kecelakaan di jalan. Keselamatan di jalan dalam dalam berlalu lintas merupakan aspek penting yang menjadi sasaran peningkatan sistem angkutan jalan disamping kelancaran keamanan, keandalan, efisiensi dan keselarasan dengan lingkungan. Indikator keselamatan lalu lintas jalan, yang utama adalah tinggi rendahnya tingkat kecelakaan lalu lintas. Selain itu aspek keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas adalah hal yang sangat penting bagi pengguna jalan.

2. Indeks *community policing*.

*Community Policing* (selanjutnya disebut sebagai Pemolisian Komunitas) adalah suatu upaya kolaborasi antara polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi masalah-masalah kejahatan dan ketidaktertiban untuk mengembangkan Pemolisian Komunitas, baik sebagai filosofi dan sebuah strategi organisasional, membawa polisi dan penduduk komunitas untuk bekerja sama secara erat dalam sebuah cara baru untuk menyelesaikan masalah kejahatan (*problem solving*), ketakutan terhadap kejahatan, ketidaktertiban fisik dan sosial.



Pemolisian Komunitas merupakan model perpolisian yang menekankan adanya kemitraan yang sejajar antara petugas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang dapat mengancam Kamtibmas. Tujuannya adalah mengurangi kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

3. *Response time* kehadiran polisi di TKP.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Polda Sultra kepada masyarakat dalam bidang tugas penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) maka dibutuhkan sosok petugas Polri yang humanis, terampil, cekatan, cermat dan teliti serta tetap tegas dalam melakukan segala tindakan kepolisian khususnya dalam hal Penanganan TPTKP dan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP).

4. Tingkat keamanan di jalur perairan Sultra.

Demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Sultra dari ancaman baik faktual dan potensial dibutuhkan strategi keamanan laut yang efektif dan efisien. Satuan polisi perairan dan udara dalam melaksanakan kegiatan patroli perairan dan udara di wilayah hukum Polda Sultra untuk menekan terjadinya tindak pidana.

5. Pengamanan objek vital.

Sesuai dengan perundangan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, Polri berkewajiban untuk melaksanakan pengamanan objek-objek khusus. Objek khusus adalah objek yang karena kedudukan dan kepentingannya memerlukan perhatian dan tindakan pengamanan.

Objek khusus meliputi:

- a. Objek Vital, yaitu kawasan, tempat, bangunan dan usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan;
- b. Objek Wisata, yaitu tempat-tempat dan atau kegiatan-kegiatan tertentu yang dikunjungi orang sehubungan dengan nilai-nilai sosial budaya atau kondisinya.

c. objek .....

- 
- c. Objek Khusus Tertentu, seperti: Kantor bank/lembaga keuangan, rumah sakit, lembaga permasyarakatan, terminal, pasar tradisional, hotel, rumah ibadah, kantor media massa, Mal, dan lain-lain.
  6. Tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam upaya penanganan konflik, pengendalian sosial merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah sekaligus mengatasi terjadinya konflik. Melalui hal tersebut, masing-masing individu, kelompok atau masyarakat diarahkan untuk dapat berperilaku selaras sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian tercipta suasana yang aman, tertib dan nyaman di dalam masyarakat.

Mengacu kepada Pasal 15 ayat 1 huruf (b) UU Kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Upaya-upaya penyelesaian perselisihan atau konflik sendiri telah sedemikian rupa diatur di dalam UU Penanganan Konflik Sosial yang meliputi: penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan/atau bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Peran kepolisian dalam tahap krisis tersebut sangatlah vital. Keterampilan penyelidikan dan kecepatan serta ketepatan pengambilan keputusan menjadi sangat diperlukan dalam penanggulangan huru-hara di masa konflik. Di dalam tubuh kepolisian terdapat beberapa elemen sekaligus yang membantu menjalankan peran kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban, yakni Samapta, Brimob, Reskrim dan Intelkam. Dalam tahapan ini merujuk pada PROTAP tahun 2010 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, kepolisian dapat mengambil sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

## 7. Rasio potensi gangguan.

Secara teoretik konsep keamanan dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan dengan persoalan akar kejahatan yang merupakan eskalasi dari adanya persoalan sosial. Sebagai contoh, masalah pengangguran, kemiskinan dan urbanisasi mengandung "potensi gangguan" apabila tidak ditanggulangi dengan baik, situasi tersebut mendorong terjadinya kejahatan yang dikenal dengan istilah "ambang gangguan". Sedangkan peristiwa kejahatan merupakan eskalasi dari situasi dan kondisi "gangguan nyata" atau "ancaman faktual".

Pola penanggulangan Kamtibmas harus disesuaikan dengan ketiga proyeksi sebagai berikut:

- a. Untuk "potensi gangguan", strategi penanggulangan yang digunakan adalah "pencegahan". Strategi ini bersifat mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor dalam kehidupan masyarakat, terutama yang bersifat negatif dan berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melalui pembinaan;
- b. Untuk "ambang gangguan", strategi penanggulangan yang digunakan bersifat "penangkalan". Kerentanan kondisi tersebut diatasi melalui upaya "penangkalan" dengan sasaran untuk mengurangi "faktor kesempatan" dan menurunkan "faktor niat", melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun patroli;
- c. Sedangkan untuk menghadapi "ancaman nyata" maka strategi yang digunakan bersifat "penegakan hukum".

Ketiga jenis strategi dan pola penanggulangan di atas dalam pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Polri, melainkan harus juga melibatkan potensi masyarakat dan unsur institusi terkait sesuai batas kewenangannya masing-masing. Dengan melibatkan potensi masyarakat dan institusi lainnya itu, maka secara *hipotesis* (dugaan sementara) semua gangguan Kamtibmas dalam berbagai bentuk kejahatan, pelanggaran hukum, kerusuhan massal, bencana alam, dan gerombolan bersenjata pada prinsipnya akan dapat ditanggulangi secara efektif.

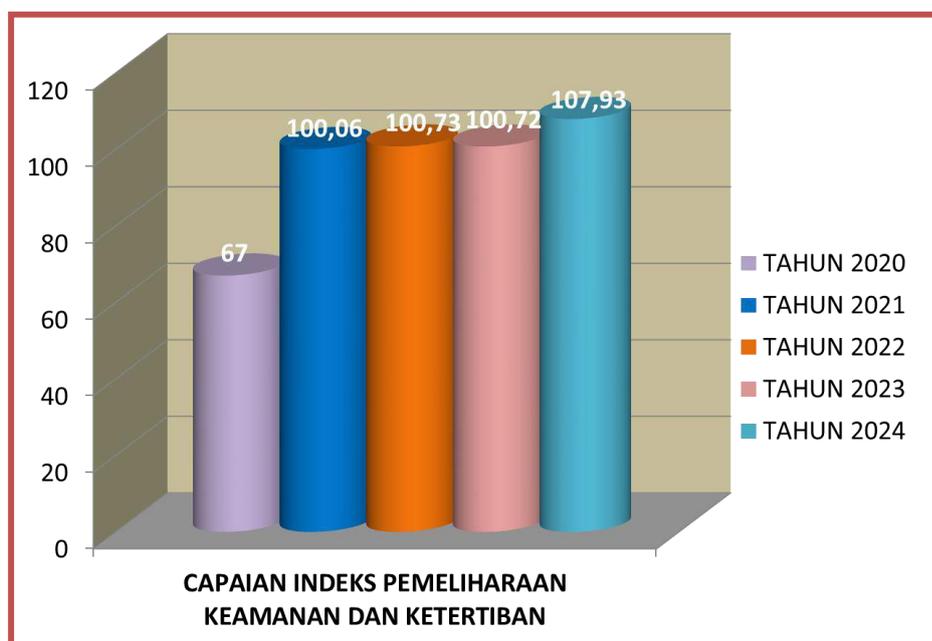
8. *Crime rate.*

*Crime Rate* adalah angka yang menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu, dimana angka kejahatan per 100.000 penduduk.

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA: Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban		
TAHUN	REALISASI	CAPAIAN
2020	52.2	67%
2021	52.23	100.06%
2022	55.30	100.73%
2023	75.64	100.72%
2024	80.41	107.93%

GRAFIK



Indikator kinerja indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban tahun 2024 telah terealisasi 80,41 dengan tingkat capaian sebesar 107,93% sedangkan untuk tahun 2023 tingkat realisasi sebesar 75,64 dengan tingkat capaian sebesar 100,72%..

**Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra** maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target 2024 (Akhir Renstra)	%
Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	80.41	74.5	107.93%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024, indikator kinerja indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban telah tercapai sebesar 80,41 sedangkan target tahun 2024 (tahun akhir renstra) sebesar 74,5 sehingga telah mencapai target untuk tahun akhir Renstra 2024.

Perbandingan realisasi Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban tahun 2024 yaitu target tahun 2024, realisasi tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
74.5	80.41	75.64	74.5

Untuk mencapai target, Satker jajaran Polda Sultra yang melaksanakan tugas preemtif, preventif dan penegakan hukum lebih proaktif memberikan kenyamanan dalam melayani masyarakat baik dari segi sarana prasarana maupun dari kualitas SDM yang berkompeten.

**Berdasarkan analisis keberhasilan pencapaian kinerja** antara lain:

1. Bhabinkamtibmas telah maksimal dalam melakukan pembinaan desa/kelurahan;
2. semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;
3. tim patroli melaksanakan pelayanan prima dengan cepat dan tanggap menuju TKP;
4. meningkatkan pengamanan dengan melakukan pengawasan secara *continue* terhadap objek-objek vital untuk mendeteksi potensi ancaman;
5. personel Satbrimob Polda Sultra telah memahami Tupoksi masing-masing dalam penanggulangan terorisme, aksi radikal dan konflik sosial.

Berbagai .....



Berbagai upaya yang dilakukan Polda Sultra dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam rangka terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang akan ditempuh meliputi:

1. intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional termasuk bentuk-bentuk kejahatan baru beserta kejahatan kerah putih secara simultan dengan meningkatkan kapasitas institusi keamanan termasuk intelijen dan kontra intelijen;
2. meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan nasional terutama melalui deteksi dini dan interdiksi darat, laut maupun udara;
3. melakukan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan Narkoba;
4. mengamankan perairan laut guna mencegah, menangkal dan menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan secara illegal baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri;
5. mencegah dan menindak pelaku praktek usaha kehutanan yang menyalahi peraturan dan perundangan yang berlaku, baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi;
6. memberikan teladan praktek penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan membangun *community policing* (pemolisian masyarakat) untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar terbina kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. meningkatkan profesionalisme personel Polri melalui pembinaan kinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi dan manajemen perilaku serta pemantapan struktur organisasi kepolisian dan meningkatkan rasio polisi;
8. meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum terutama kepolisian.



## Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

### 1. sumber daya manusia:

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polda Sultra dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 walaupun dengan jumlah personil yang belum sesuai dengan peta jabatan yang seharusnya pada Polda Sultra tetapi kinerja yang sudah diperjanjikan tetap bisa dicapai. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen pimpinan yang selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja serta peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan sistem/metode. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Polda Sultra telah meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan:

- a. peningkatan pemahaman terkait program prioritas Kapolri;
- b. melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) baik bidang operasional maupun bidang pembinaan;
- c. mengirimkan personil dalam kegiatan pelatihan maupun kejuruan pada fungsi-fungsi kepolisian;
- d. peningkatan kualitas personil Polda Sultra dengan memberikan dukungan kepada personil yang akan melanjutkan pendidikan pengembangan Polri maupun pendidikan umum seperti S1, S2 dan S3.

### 2. sumber daya keuangan:

Indikator indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban Provinsi Sultra didukung dari anggaran program Harkamtibmas Polda Sultra dengan pagu anggaran sebesar Rp. 446.975.008.000,-, realisasi sebesar Rp. 442.290.122.898,- atau terealisasi sebesar 98,95%.



**TABEL**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFESIENSI
<b>Terwujudnya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</b>					
1	Rasio Potensi Gangguan	Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	107.93	98.95	8.98
2.	<i>Response Time</i>				
3.	Tingkat Keberhasilan Penanganan Konflik				
4.	Tingkat Kesiapan Penggerakan Pasukan				
5.	Indeks Keselamatan di Jalan				
6.	<i>Crime Rate.</i>				

*Tingkat efisiensi = capaian kinerja – realisasi anggaran*

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran, sarana prasana dan SDM dalam melaksanakan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja.

**Analisis program/kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

1. pengkajian potensi konflik;
2. pengkajian sistem keamanan;
3. pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan serta pengembangan sistem informatika pengelolaan keamanan;
4. penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan.
5. pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan;
6. pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa;

7. pemberian .....

- 
7. pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan;
  8. peningkatan kualitas pelayanan kepolisian;
  9. pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat;
  10. pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi;
  11. penyelamatan masyarakat dengan memberikan bantuan/pertolongan dan evakuasi terhadap pengungsi serta korban;
  12. pemulihan keamanan melalui pemulihan darurat polisionil, penyelenggaraan operasi kepolisian serta pemulihan daerah konflik vertikal maupun horizontal;
  13. penyelenggaraan kerjasama bantuan TNI ke Polri;
  14. penyelenggaraan kerjasama dengan Pemda/instansi terkait;
  15. mengintensifikasi penyelidikan dan penyelidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non diskriminatif;
  16. koordinasi dan pengawasan teknis penyidik pegawai negeri sipil.
  17. peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang Narkoba;
  18. peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat;
  19. peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) Narkoba;
  20. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi;
  21. mengupayakan dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana;
  22. membangun sistem dan model perencanaan dan pengembangan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba sebagai pedoman penanganan Narkoba di Sulawesi Tenggara;
  23. menyelenggarakan kampanye dan sosialisasi anti Narkoba;
  24. pengembangan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan.
  25. penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku *illegal fishing* dan *illegal mining*;
  26. penggiatan upaya pengawasan dan pengamanan laut terpadu berbasis masyarakat dan aparat.

## SS. 2

# TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM SECARA BERKEADILAN

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat dalam penerapan hukum yang diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila lima pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukum, aparat penegak hukum, faktor warga masyarakat yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture* serta faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

WJP (*World Justice Project*) menakar kondisi supremasi hukum negara-negara berdasarkan 8 faktor seperti: pembatasan kekuasaan pemerintahan secara konstitusional, keterbukaan pemerintah, ketertiban dan keamanan, penegakan undang-undang, keadilan sipil, sistem peradilan pidana dan ketiadaan korupsi di pemerintahan.

Indonesia adalah negara yang berdasar hukum. Indeks negara hukum (*rule of law*) ini merupakan alat kuantitatif untuk mengukur bagaimana *rule of law* dalam praktik negara-negara yang dikaji. Salah satu tugas pokok Polri adalah penegakan hukum sehingga Polda Sultra sendiri menjadikan indeks penegakan hukum sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penegakan Hukum	77.5	85.37	110.15%

Indeks .....

Indeks Gakkum Polri mengukur kinerja Polri dalam menyelesaikan suatu tindak kejahatan. Indeks Gakkum Polri dihitung dari rata-rata bobot 6 variabel pembentuk dimensi Gakkum Polri.

Untuk pencapaian indikator kinerja pada indeks penegakan hukum Polda Sultra untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 77,5 dan terealisasi sebesar 85,37 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 110,15%. Dalam penilaian indeks penegakan hukum Polda Sultra tahun 2024, ada tiga analisis statistik kejahatan yang dinilai yaitu:

1. *crime total* (jumlah tindak pidana);
2. *crime clearance* (prosentase penyelesaian tindak pidana);
3. *crime indeks* (kejahatan serius atau sering terjadi yang menimbulkan keresahan di masyarakat).

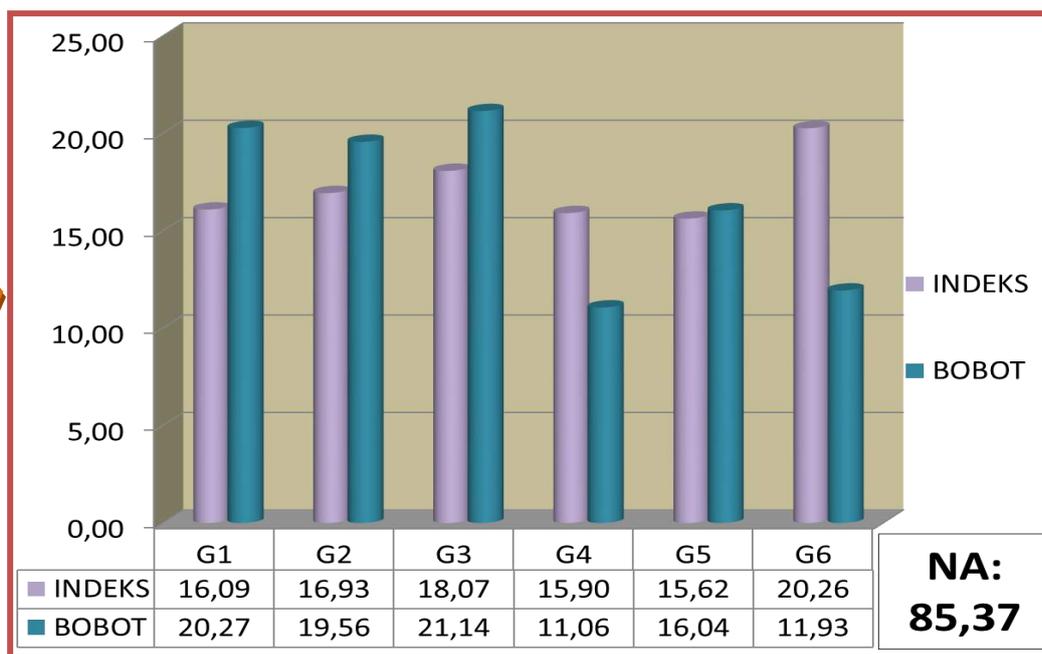
Indikator Kinerja	Indeks Gakkum	
<b>Formula</b>		<b>Karakteristik Indikator Kinerja</b>
$IG = 20X \left( \sum_{i=1}^6 W_i X_i \right)$		
<b>IG</b> : Indeks Gakkum <b>X<sub>1</sub> s.d. X<sub>6</sub></b> : Nilai indeks masing-masing indikator kinerja dalam dimensi Harkamtibmas <b>W<sub>1</sub> s.d. W<sub>6</sub></b> : Bobot masing - masing Indikator kinerja dalam Dimensi Harkamtibmas  Catatan: Adanya pengali berupa konstanta 20 mengingat Indeks Kamtibmas menggunakan skala 1-5, sedangkan Indeks Harkamtibmas dan Gakkum Polri menggunakan skala 1-100;	<b>Satuan Pengukuran</b>	<i>Indeks</i>
	<b>Dimensi</b>	Gakkum
	<b>Sumber Data</b>	Ditreskrim, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba
	<b>Sumber Data</b>	Ditreskrim, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba
	<b>Sumber Data</b>	Ditreskrim, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba

Distribusi Skor per Level Kinerja		Kinerja Level 1	Kinerja Level 2	Kinerja Level 3	Kinerja Level 4	Kinerja Level 5
Indeks Gakkum	TW1	20- < 40	40- < 60	60- < 80	80- < 90	90- < 100
	TW2	20- < 40	40- < 60	60- < 80	80- < 90	90- < 100
	TW3	20- < 40	40- < 60	60- < 80	80- < 90	90- < 100
	TW4	20- < 40	40- < 60	60- < 80	80- < 90	90- < 100

Dari tiga analisis statistik kejahatan dalam setiap prinsip penegakan hukum tahun 2024 dapat dilihat dari enam indikator kinerja pada indeks penegakan hukum yang menjadi penilaian. Apabila nilai yang didapat dari setiap analisis statistik kejahatan dikonversi menurut bobot setiap analisis statistik kejahatan, maka nilai tiap analisis statistik kejahatan maka penegakan hukum yang dihasilkan dalam indeks penegakan hukum tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Indeks TW1	Indeks TW2	Indeks TW3	Indeks TW4	Bobot
Gakkum Polri	G1 Clearance rate kejahatan konvensional	2,79	4,33	4,43	4,540	20,27%
	G2 Clearance rate kejahatan transnasional	3,07	4,67	4,85	4,349	19,56%
	G3 Clearance rate kejahatan terhadap kekayaan negara	4,71	4,22	4,60	4,540	21,14%
	G4 Clearance rate kejahatan implikasi kontijensi	1,56	5,00	5,00	4,349	11,06%
	G5 Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas	4,13	2,79	4,16	4,540	16,04%
	G6 Persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan Indonesia	2,58	11,00	2,13	4,540	11,93%

**INDEKS PENEGAKAN HUKUM POLDA SULTRA TAHUN 2024**



Berdasarkan tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa nilai indeks penegakkan hukum Polda sultra tahun 2024 sebesar 85,37 atau capaian sebesar 110,15%, data *score* 85,37 tersebut diperoleh dari perkalian nilai indeks tahun 2024 dengan nilai total bobot. Persentase penyelesaian tindak pidana di jalur perairan Sultra (G6) mempunyai indeks tertinggi dengan nilai 20,26, clearance rate

kejahatan .....

kejahatan terhadap kekayaan negara (G3) menduduki urutan kedua dengan nilai indeks sebesar 18,07 dan clearance rate kejahatan transnasional (G2) menduduki urutan ketiga dengan nilai indeks sebesar 19,56.

Nilai indeks penegakan hukum didapatkan dari hasil evaluasi analisis statistik kejahatan pada unit reserse kriminal yang telah ditentukan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi analisis statistik kejahatan pada Polda Sultra tahun 2024 mendapatkan nilai 85,37 dan nilai ini diharapkan dapat meningkat setiap tahun.

Hasil pengukuran berupa Indeks dan kategori menggambarkan kapasitas penyelenggaraan penegakan hukum serta menjadi dasar pemeringkatan kinerja penyelenggaraan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Dengan demikian, terdapat peningkatan *locus* evaluasi indeks penegakan hukum dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ketiga sasaran analisis statistik kejahatan ini memberikan penegakan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat secara masif dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

**Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:**

INDIKATOR KINERJA UTAMA: Indeks Penegakan Hukum		
TAHUN	REALISASI	CAPAIAN
2020	89.9	109%
2021	89.89	100.55%
2022	90.51	100.69%
2023	74.86	100.15%
2024	85.37	110.15%

GRAFIK .....

## GRAFIK



Indikator kinerja indeks penegakan hukum tahun 2024 telah terealisasi sebesar 85,37 dengan tingkat capaian sebesar 110,15% sedangkan untuk tahun 2023 tingkat realisasi sebesar 74,86 dengan tingkat capaian sebesar 100,15%.

**membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam** dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target 2024 (Akhir Renstra)	%
Indeks Penegakan Hukum	85.37	77.5	110.15%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator kinerja indeks penegakkan hukum telah tercapai, dimana target akhir renstra (tahun 2024) sebesar 77,5 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 85,37 dengan tingkat capaian sebesar 110,15%.

Perbandingan realisasi Indeks Penegakan hukum tahun 2024 yaitu target tahun 2024, realisasi tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target .....

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
77.5	85.37	74.86	77.5

Untuk mencapai target, Polda Sultra melaksanakan penegakan hukum lebih proaktif memberikan kenyamanan dalam melayani masyarakat baik dari segi sarana prasarana maupun dan dari kualitas SDM yang berkompeten.

**Berdasarkan analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja,** berbagai upaya yang dilakukan Polda Sultra untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Penegakan hukum yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari penemuan ide-ide baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis, dan penyelenggara pelayanan harus melakukan terobosan kreatif secara berkelanjutan yang bertujuan agar setiap Satuan Fungsi (Satfung) menghasilkan inovasi setiap tahun. Selain itu keberhasilan Polda Sultra dalam menegakan hukum disebabkan karena:

1. aktifnya penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas penyidikan;
2. terdukungnya anggaran dan sarana prasarana;
3. pelaksanaan gelar perkara secara terjadwal;
4. sebagian besar penyidik/penyidik pembantu sudah memiliki sertifikasi penyidik.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan tugas yaitu:

1. jumlah penyidik yang tidak seimbang dibanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani, bila dibandingkan dengan bobot tingkat kesulitan kegiatan yang harus dilaksanakan;
2. adanya perbedaan pendapat dan penafsiran dalam penanganan kasus yang melibatkan instansi lain;
3. pemeriksaan saksi ahli membutuhkan waktu yang cukup relatif lama dan membutuhkan anggaran yang besar;
4. adanya saksi yang berdomisili di luar wilayah hukum Polda Sultra;
5. adanya saksi yang sudah berulang kali di panggil namun tidak hadir;

6. adanya .....

- 
6. adanya tugas rangkap terhadap para penyidik / penyidik pembantu di lapangan (BKO) Polres jajaran;
  7. pengungkapan kasus tanah memerlukan waktu yang cukup lama apalagi kedua belah pihak masing-masing memiliki bukti kepemilikan atau dokumen;
  8. masih adanya personel yang belum memiliki Skep penyidik/penyidik pembantu.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:**

1. sumber daya manusia

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polda Sultra dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 walaupun dengan jumlah personil yang belum sesuai dengan peta jabatan yang seharusnya pada Polda Sultra tetapi kinerja yang sudah diperjanjikan tetap bisa dicapai. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen pimpinan yang selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja serta peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan sistem/metode. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Polda Sultra telah meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan:

- a. peningkatan pemahaman terkait program prioritas Kapolri;
- b. melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) baik bidang operasional maupun bidang pembinaan;
- c. mengirimkan personil dalam kegiatan pelatihan maupun kejuruan pada fungsi-fungsi kepolisian;
- d. peningkatan kualitas personil Polda Sultra dengan memberikan dukungan kepada personil yang akan melanjutkan pendidikan pengembangan Polri maupun pendidikan umum seperti S1, S2 dan S3.

2. sumber daya keuangan

Indikator indeks penegakan hukum didukung dari anggaran program Lidik Sidik Tindak Pidana Polda Sultra dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.979.158.000,-, realisasi sebesar Rp. 72.725.893.417,- atau terealisasi sebesar 99,65%.



**TABEL**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFESIEN SI
<b>Terwujudnya Penegakan Hukum Secara Berkeadilan</b>					
1.	CRK konvensional	Indeks Penegakan Hukum	110.15	99.65	10.5
2.	CRK transnasional				
3.	CRK terhadap kekayaan negara				
4.	CRK implikasi kontinjensi				
5.	% selesasi perkara TP laka lantasi				
6.	% selesasi TP di jalur perairan Sultra				

*Tingkat efisiensi = capaian kinerja – realisasi anggaran*

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran, sarana prasana dan SDM dalam melaksanakan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Fungsi (Satfung) dalam melakukan penegakan hukum mengharuskan untuk melakukan optimalisasi terhadap pemanfaatan personil yang tersedia. Ketimpangan jumlah personil yang mempunyai kompetensi teknis memadai dengan beban kerja yang masih cukup besar dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan petugas dalam menegakkan hukum dapat berjalan sesuai dengan SOP. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung penegakan hukum akan mempercepat pelayanan dan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Upaya yang dilakukan Polda Sultra dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam rangka penegakan hukum adalah:

1. menyelenggarakan latihan peningkatan kemampuan bagi para penyidik sesuai bidang tugasnya, mengikutsertakan personel fungsi reserse dalam pendidikan pengembangan yang dilaksanakan oleh SDM, mengikutsertakan personel fungsi reserse dalam kursus/pelatihan dari bantuan negara asing, pengendalian dan pengawasan secara berjenjang terhadap proses penanganan kasus oleh para penyidik dan pengajuan usulan penambahan jumlah penyidik;

2. menjalin .....

- 
2. menjalin sinergitas dengan unsur penegak hukum lainnya seperti Jaksa penuntut umum dengan maksud agar pemberkasan kasus dapat diselesaikan secara cepat dan tersangka serta barang bukti dapat dilimpahkan ke pengadilan. Untuk meningkatkan kinerja fungsi Reskrim, Polda Sultra memberikan asistensi kepada Polres yang mengalami kesulitan dalam menangani kasus terutama kasus yang menjadi sorotan publik dan senantiasa memberikan *back up* kepada satuan wilayah agar kasus dapat diselesaikan secara cepat dan transparan;
  3. berkoordinasi dengan instansi terkait yang berbeda pendapat dan penafsiran guna mempercepat penyelesaian perkara, menjalin/mempererat hubungan komunikasi dengan saksi ahli yang sudah menjadi mitra dan mencari jaringan saksi ahli lainnya baik dari Sultra maupun di luar Sultra serta memberikan panggilan berdasarkan KUHAP dan batas waktu yang telah ditentukan oleh penyidik apabila saksi masih berhalangan hadir maka penyidik mendatangi saksi sesuai alamat.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja** yaitu:

1. melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi/lembaga pemerintah yang terkait dalam penegakan hukum;
2. meningkatkan penegakkan hukum sesuai dengan SOP;
3. melaksanakan pelatihan kepada personel yang bertugas di bidang penyidik;
4. dilaksanakan Anev secara rutin;
5. hasil Anev dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas;
6. menuntaskan tunggakan kasus;
7. penyidik/penyidik pembantu lebih pro aktif mendatangi saksi atau korban;
8. memberdayakan Bhabinkamtibmas dan Krimserse di wilayah binaannya masing-masing dalam hal penanganan kasus-kasus ringan/Tipiring (*problem solving*);
9. meningkatkan koordinasi internal secara berjenjang.

Polda Sultra telah berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan selaku aparat penegak hukum dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. peningkatan .....

- 
1. peningkatan kualitas dan kemampuan personel selaku aparat penegak hukum yang lebih profesional, modern dan terpercaya;
  2. melakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan personel Polri (*werving*), melakukan pendidikan dan pelatihan dan mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum;
  3. mengupayakan peningkatan kesejahteraan personel yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

## **SS. 3**

### **TERWUJUDNYA SDM POLDA SULTRA YANG PROFESIONAL**

Untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi diperlukan SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Kebutuhan tersebut memerlukan peningkatan mutu profesionalisme dan sikap pengabdian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembinaan personel Polri.

Dalam rangka mendukung terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional diperlukan standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap Personel Polri, yang terdiri dari standar kompetensi teknis, standar kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis, kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan dan kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Standar kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang personel Polri dalam melaksanakan tugas jabatan. Standar kompetensi manajerial ini disusun oleh instansi pemerintah di lingkungan masing-masing baik di pusat maupun daerah, sehingga dalam pengisian jabatan harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

SDM .....

SDM aparatur yang kompeten adalah SDM yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi diantaranya menjadi pelayan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, menjadi penyangga persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi motivator dalam proses memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, menjadi inovator dan kreator dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru di bidang pelayanan masyarakat sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien; serta menjadi inisiator yang selalu bersemangat menjalankan tugasnya dilandasi dengan nilai-nilai keikhlasan dan ketulusan.

Pengembangan SDM bertujuan meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi yang pada akhirnya personel mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program Peningkatan SDM berbasis kompetensi bertujuan meningkatkan kualitas dan produktivitas.

Pencapaian sasaran terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional diukur dari dua indikator yaitu:

1. Indeks profesionalitas SDM Polda Sultra;
2. Indeks kompetensi Diklat SDM Polda Sultra.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polda Sultra tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Polda Sultra tahun 2023 dengan realisasinya.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
<b>Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra</b>	<b>59.5</b>	<b>87.12</b>	<b>146.42%</b>

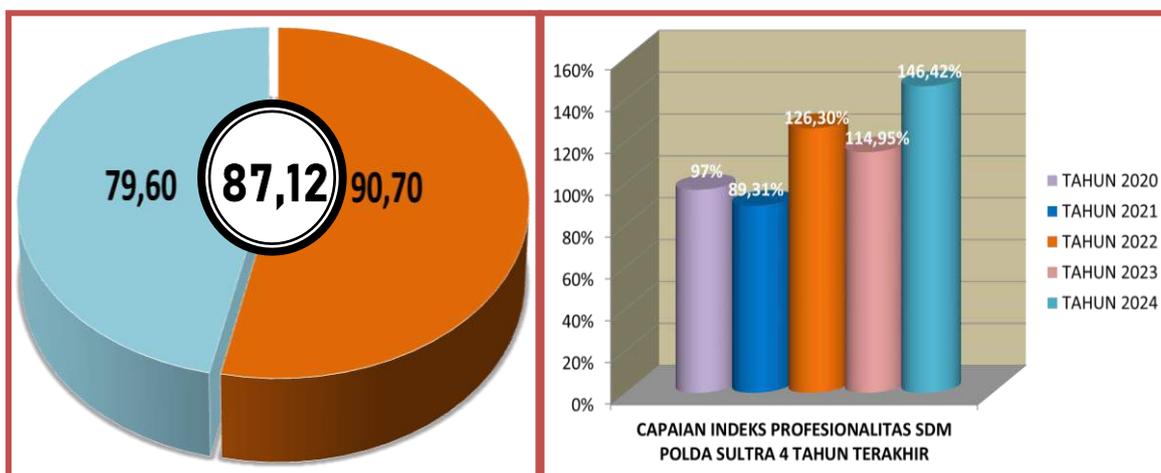
Untuk pencapaian indikator kinerja pada indeks profesionalitas SDM Polda Sultra untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 59,5 dan terealisasi sebesar 87,12 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 146,42%. Dalam penilaian tersebut untuk tahun 2024 ada dua faktor yang nilai yaitu:

1. faktor spesifik yang mencakup penilaian kontrak kinerja dan tugas tambahan;
2. faktor generik yang mencakup penilaian perilaku kerja anggota, penghargaan dan hukuman.

Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas personel Polda Sultra berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan personel Polda Sultra dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks ini secara nasional dijadikan acuan intervensi kebijakan peningkatan profesionalitas personel Polda Sultra dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengukuran indeks berdasarkan PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Polda Sultra terdiri dari 42 Satker dengan rincian 28 Satker Mapolda Sultra, 14 Polres dengan jumlah riil personel sebanyak 8.862 personel atau baru mencapai 44.5% dari DSP (Jumlah DSP Polda Sultra sebanyak 19.916 personel). Dibawah ini adalah nilai indeks profesionalitas SDM Polda Sultra tahun 2024:

URAIAN	NILAI SIPK PERS POLDA SULTRA TAHUN 2024		
	NILAI FG	NILAI FS	NILAI AKHIR
PERS POLDA SULTRA	79,60	90,70	87,12



Data dan grafik diatas menggambarkan bahwa nilai indeks profesionalitas SDM Polda Sultra tahun 2024 sebesar 87.12 dengan rincian faktor generik sebesar 79.60 dan faktor spesifik sebesar 90.70.

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir maka, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



INDIKATOR KINERJA UTAMA: Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra		
TAHUN	REALISASI	CAPAIAN
2020	50.1	89.1%
2021	56.83	96.9%
2022	71.22	126.3%
2023	66.33	114.95%
2024	87.12	146.42%

**GRAFIK**  
TINGKAT CAPAIAN KINERJA INDEKS PROFESIONALITAS SDM



Untuk tahun 2024 pada indikator kinerja nilai indeks profesionalitas SDM Polda Sultra terealisasi sebesar 87.12 dengan tingkat capaian sebesar 146.42% sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 66.33 dengan tingkat capaian sebesar 114.95%.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target 2024 (Akhir Renstra)	%
Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra	87.12	59.5	146.42 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024, indikator kinerja nilai indeks profesionalitas SDM Polda Sultra sudah melebihi target akhir Renstra (tahun 2024).

Perbandingan .....

Perbandingan realisasi Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra tahun 2024 yaitu target tahun 2024, realisasi tahun 2023 dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
59.5	87.12	66.33	59.5

**Analisis penyebab tercapainya target:**

1. Polda Sultra sudah memiliki dua Polres yang mendapat predikat WBK dari Menpan RB dan Satker jajaran Polda Sultra sudah beberapa kali mendapat piagam penghargaan terkait pelayanan publik;
2. Polda Sultra memberikan *reward* secara berkala kepada personelnya yang berprestasi;
3. Personel Polda Sultra secara berkala melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:**

1. sumber daya manusia:

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polda Sultra dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 walaupun dengan jumlah personil yang belum sesuai dengan peta jabatan yang seharusnya pada Polda Sultra tetapi kinerja yang sudah diperjanjikan tetap bisa dicapai. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen pimpinan yang selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja serta peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan sistem/metode. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Polda Sultra telah meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan:

- a. peningkatan pemahaman terkait program prioritas Kapolri;
- b. melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) baik bidang operasional maupun bidang pembinaan;
- c. mengirimkan personil dalam kegiatan pelatihan maupun kejuruan pada fungsi-fungsi kepolisian;
- d. peningkatan kualitas personil Polda Sultra dengan memberikan dukungan kepada personil yang akan melanjutkan pendidikan pengembangan Polri maupun pendidikan umum seperti S1, S2 dan S3.

2. sumber .....

2. sumber daya keuangan:

Indikator indeks profesionalitas SDM Poldasultra didukung dari anggaran program profesionalisme SDM Polri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.692.188.000,-, realisasi sebesar Rp. 42.323.923.935,- atau terealisasi sebesar 99,14%.

**TABEL**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
<b>Terwujudnya SDM Poldasultra yang profesional</b>					
1	Profesionalisme SDM Polri	Indeks profesionalitas SDM Poldasultra	146.42	99.14	47.28

*Tingkat efisiensi = capaian kinerja – realisasi anggaran*

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Poldasultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran, sarana prasana dan SDM dalam melaksanakan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja. Keterbatasan personel, sarana dan prasarana dan anggaran yang dimiliki oleh Poldasultra merupakan suatu permasalahan namun Poldasultra tidak mengalami kendala dalam menjalankan tugas-tugas rutin.

**Ada beberapa analisis program atau kegiatan** yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Poldasultra yaitu:

1. untuk mendapatkan personel Polri yang memiliki komitmen tinggi dan siap/konsisten mengabdikan diri di Polri dengan segala konsekuensinya, perlu evaluasi pada *assessment tools* psikologi yang digunakan, tidak terbatas pada pengukuran intelektualitas saja tetapi juga mencakup kondisi psikologis personel pada saat proses rekrutmen berlangsung, hal ini untuk mengurangi beban stres yang terjadi, baik pada proses pendidikan maupun saat pelaksanaan tugas di satuan kewilayahan;
2. melakukan evaluasi persemester terhadap nilai 13 kompetensi personel Polri Poldasultra;
3. melakukan sosialisasi budaya organisasi berkeunggulan melalui penilaian 13 kompetensi individu personel Polri.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
<b>Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Sultra</b>	<b>91.9</b>	<b>93.92</b>	<b>102.20%</b>

Untuk pencapaian indikator kinerja pada indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Sultra untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 91,9 dan terealisasi sebesar 93,92 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 120,20%.

Dengan tantangan tugas semakin berat dan kompleks serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah terutama Polri, maka Polri harus mampu menjadi institusi yang mandiri, transparan, bersih dan berwibawa dalam mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang professional dengan menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia.

Harapan dan tuntutan masyarakat tersebut telah terakomodir dalam Visi dan Misi Polri secara berjenjang dan telah dijabarkan menjadi kebijakan Polda Sultra untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Polri melalui penyelenggaraan Program Pendidikan Polri dan Pelatihan Polri dikaitkan dengan tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks, serta berbagai masalah dan kendala yang dihadapi baik aspek struktural, instrumental maupun kultural perlu diantisipasi melalui penataan sistem Program Pendidikan dan Pelatihan Polri sehingga mampu menghasilkan hasil didik yang berjiwa pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan sebagai abdi masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum.

Indeks kompetensi Diklat SDM Polda Sultra adalah ukuran statistik yang menggambarkan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar pendidikan. Terdapat 8 (delapan) penilaian standar komponen pendidikan dimana merupakan sebuah upaya agar para pengajar bisa lebih efektif dan efisien dalam menunaikan tujuan pendidikan. Selain itu dapat digunakan memenuhi syarat segi pengetahuan keterampilan, sikap dan perilaku untuk memperoleh personil yang layak untuk meningkatkan kinerja baik dalam seleksi, sekolah, pangkat dan jabatannya.

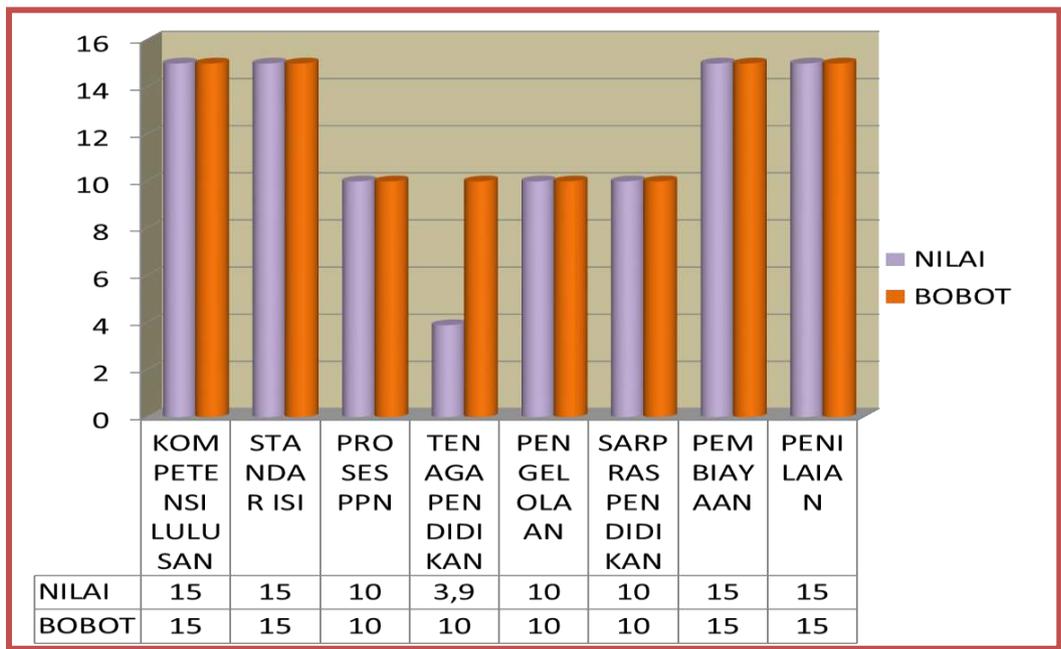
Dalam .....

Dalam penilaian tersebut untuk tahun 2024 ada 8 (delapan) komponen yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan terdiri dari: Sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan/keilmuan, keterampilan kerja umum dan keterampilan kerja khusus;
2. Standar isi (Kurikulum dan Modul) terdiri dari: Jumlah modul dan hanjar;
3. Standar Proses PPN (Pembelajaran, Pengasuhan dan Nilai) terdiri dari: Pengantar, Kelompok mata pelajaran, Pembulatan dan kegiatan pengasuhan;
4. Standar Tenaga Pendidikan terdiri dari: Gadik fungsional dan Gadik struktural;
5. Standar Pengelolaan terdiri dari: Metode pembelajaran dan manajemen operasional pendidikan;
6. Standar Sarpras Pendidikan terdiri dari: Daya tampung dan fasilitas pendidikan;
7. Standar Pembiayaan terdiri dari: Makan sebelum Dik, ULP dan Ekstra Fooding, makan setelah Tup Dik, makan setelah TUP Dik, uang saku siswa, Opsdik (Cetak hanjar dan Honor);
8. Standar Penilaian terdiri dari: Aspek akademik, aspek mental dan aspek kesamaptaan.

Dibawah ini adalah nilai indeks kompetensi Diklat SDM Polda Sultra tahun 2024:

INDEKS KOMPETENSI SDM POLDA SULTRA TAHUN 2024			
NILAI	KOMPONEN PEMBOBOTAN		
<b>93,92</b>	<b>KOMPONEN :</b>	<b>BOBOT</b>	<b>NILAI</b>
	* Standar Kompetensi kelulusan	15	15,0
	* Standar Isi (Kurikulum & Modul)	15	15,00
	* Standar Proses PPN	10	10,00
	* Tenaga Pendidikan	10	3,9
	* Pengelolaan	10	10,00
	* Sarpras Pendidikan	10	10,0
	* Pembiayaan	15	15,0
	* Penilaian	15	15,0
<b>KATEGORI SANGAT BAIK</b>	<b>JUMLAH</b>	100	93,92



Berdasarkan tabel dan grafik diatas hasil penilaian indeks kompetensi Diklat SDM Polda Sultra pada tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 93,92 dengan tingkat capaian sebesar 102,20%.

INDIKATOR KINERJA UTAMA: Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Sultra		
TAHUN	REALISASI	CAPAIAN
2020	0	0%
2021	0	0%
2022	91.8	100.21%
2023	93.15	101.47%
2024	93.92	102.20%

Pada indeks kompetensi Diklat SDM Polda Sultra tahun 2024 terealisasi sebesar 93,92 dengan tingkat capaian sebesar 102,20% sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 93,15 dengan tingkat capaian sebesar 101,47% atau terjadi peningkatan capaian sebesar 0,73%.

Ruang lingkup Indeks kompetensi Diklat SDM Polda Sultra mencakup seluruh kegiatan, sarana dan prasarana Diktukba Polri yang mana keberhasilannya diukur berdasarkan 8 (delapan) standar komponen pendidikan.

Untuk .....

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target 2024 (Akhir Renstra)	%
Indeks kompetensi Diklat SDM Polda Sultra	93.92	91.9	102.20%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024, indikator kinerja nilai indeks kompetensi Diklat SDM Polda Sultra telah melebihi target 91,9 untuk tahun 2024 (tahun akhir Renstra).

Perbandingan realisasi Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Sultra tahun 2024 yaitu target tahun 2024, realisasi tahun 2023 dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
91.9	93.92	93.15	91.9

#### Analisis penyebab tercapainya target:

1. Kurikulum yang relevan mencakup materi pembelajaran mengenai aspek-aspek hukum, investigasi, manajemen krisis, teknologi informasi, serta keterampilan interpersonal yang diperlukan dalam menjalankan tugas kepolisian.
2. Metode pembelajaran interaktif dan praktis, seperti simulasi kejadian kepolisian, studi kasus, dan latihan lapangan. Hal ini dapat membantu anggota peserta didik untuk mengasah keterampilan dan membuat mereka siap menghadapi situasi riil dengan lebih baik.
3. Pengembangan keterampilan komunikasi kepada peserta didik sehingga memiliki keterampilan komunikasi efektif, baik dalam situasi normal maupun krisis dengan jelas dan efisien, baik secara lisan maupun tertulis sehingga dapat berhubungan baik dengan masyarakat dan mitra kerja.
4. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan hal ini dilakukan untuk mengukur kemajuan peserta didik selama dan setelah pelatihan dengan melakukan evaluasi kinerja rutin, ujian penilaian, dan umpan balik dari gadik dan peserta didik sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.



## Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

### 1. Sumber Daya Manusia.

Peningkatan mutu pelayanan Polri, berawal dari lembaga pendidikan yang dituntut menghasilkan SDM Polri yang bermoral, profesional, modern, unggul dan patuh hukum serta dipercaya masyarakat. Profesionalisme Polri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aspek kompetensi yang akan dicapai melalui kurikulum pendidikan yang diselenggarakan baik pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan umum dan pendidikan pengembangan spesialisasi. Hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga pendidikan Polri untuk mewujudkan SDM Polri sesuai harapan pimpinan dan masyarakat, berkualitas dan mumpuni dalam bertugas di kewilayahan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme setiap personel Polri yang bertugas pada bidang pembinaan, dapat dicapai melalui penyelenggaraan bimbingan teknis, pelatihan, serta peningkatan kualitas personal melalui Pendidikan pengembangan maupun Pendidikan umum. Untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan program tersebut dan dapat menunjang operasional fungsi kepolisian secara umum diperlukan perencanaan program pelatihan yang disusun dengan baik agar dapat diimplementasikan oleh penyelenggara pelatihan yaitu SPN Polda. Penyusunan program pelatihan tersebut merupakan tanggung jawab bersama baik Lemdiklat Polri selaku penyusun rencana program dengan pembina fungsi Mabes Polri dan Biro SDM serta SPN Polda selaku pelaksana program.

### 2. Sumber Daya Keuangan

Indikator indeks komeptensi Diklat SDM Polda Sultra didukung dari anggaran program professional SDM Polri Polda Sultra dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.692.188.000,-, realisasi sebesar Rp. 42.323.923.935,- atau terealisasi sebesar 99,14%.

TABEL .....

**TABEL**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
<b>Terwujudnya SDM Polda Sultra yang professional</b>					
1	Profesionalisme SDM Polri	Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Sultra	172.73	99.14	73.59

*Tingkat efisiensi = capaian kinerja – realisasi anggaran*

Dalam menggefesienkan penggunaan anggaran pada sasaran atau program profesionalisme SDM Polri selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran, sarana prasana dan SDM dalam melaksanakan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja. **Ada beberapa analisis program atau kegiatan** yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Polda Sultra yaitu:

Untuk mendapatkan personel Polri yang memiliki komitmen tinggi dan siap/konsisten mengabdikan diri di Polri SPN Polda Sultra secara umum dapat menyelenggarakan dan melaksanakan pelatihan dengan baik, lancar dan aman tentunya dengan didukung dengan anggaran yang sudah terinci untuk tiap-tiap Diklat dengan melakukan evaluasi kerja maupun moneyv anggaran per triwulan, semester dan tahunan.

## SS. 4

## **MODERNISASI TEKNOLOGI POLDA SULTRA**

Modern berarti melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan alat material khusus atau Almatsus dan alat peralatan keamanan atau Alpakam yang semakin modern. Terkait dengan penggunaan alat berteknologi canggih dalam membantu tugas Polri khususnya Polda Sultra untuk mengungkap tindak pidana perlu juga dilaksanakan dengan profesional. Disamping itu perlunya modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Polda Sultra.

Modernisasi .....

Modernisasi Kepolisian di dunia manapun setidaknya menyentuh 3 (tiga) aspek utama dalam mewujudkan organisasi kepolisian yang modern yaitu modernisasi di dalam aspek manajemen kepolisian, teknologi kepolisian dan strategi pemolisian. Modernisasi di bidang manajemen kepolisian dan teknologi kepolisian mensyaratkan perubahan paradigma, strategi dan juga aspek-aspek teknis yang berhubungan dengan penataan organisasi dan penyiapan sumber daya kepolisian yang didukung peran teknologi tinggi dalam mewujudkan organisasi kepolisian yang profesional, efektif, efisien dan modern dalam era millenium.

Modernisasi alat utama sistem keamanan meliputi banyak jenis yang tersebar dalam sistem patroli kepolisian, sistem komando dan kendali kepolisian, sistem penegak hokum dan intelijen kepolisian, system penanganan dan pengendalian massa, sistem kontrol dan penganturan lalu lintas. Kesemuanya itu merupakan hal-hal yang esensial dalam kegiatan sehari hari (*day to day policing*) yang dirasakan dan bersentuhan dengan problematika masyarakat, bangsa dan negara. Pelayanan Prima Kepolisian dapat terwujud jika modernisasi kepolisian dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polda Sultra tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Polda Sultra tahun 2024 dengan realisasinya.

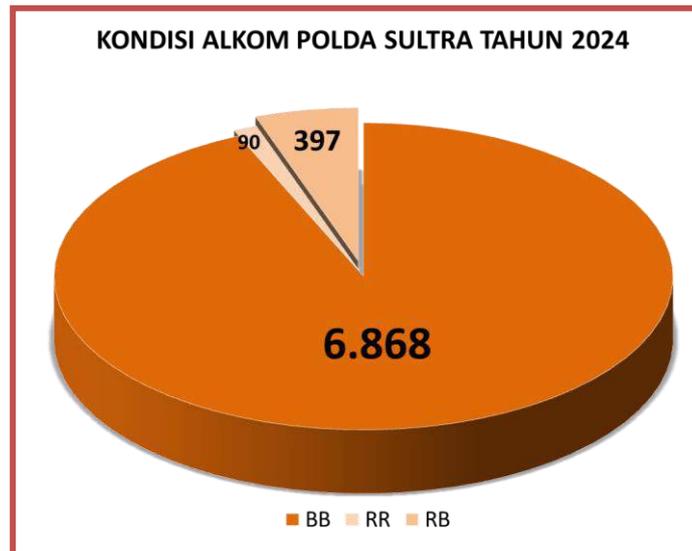
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perawatan Alkom	75	93.38	124.51%

Untuk pencapaian indikator kinerja pada persentase perawatan Alkom Polda Sultra untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 75% dan terealisasi sebesar 93,38% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 124,51%.

Jumlah Alkom yang dimiliki Polda Sultra sebanyak 7.355 unit dengan rincian sebanyak 6.868 dalam kondisi baik, sebanyak 90 unit dalam kondisi rusak ringan dan sebanyak 397 unit dalam kondisi rusak berat. Seperti yang tergambar pada diagram di bawah ini.

DIAGRAM .....

## DIAGRAM



Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir maka, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA: Persentase Perawatan Alkom		
TAHUN	REALISASI	CAPAIAN
2020	0	0%
2021	0	0%
2022	79	121.53%
2023	93.34	133.34%
2024	93.38	124.51%

Untuk tahun 2024 pada indikator persentase perawatan Alkom Polda Sultra terealisasi sebesar 93,38% dengan tingkat capaian sebesar 124,51% sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 93,34% dengan tingkat capaian sebesar 133,34% atau mengalami peningkatan capaian sebesar 8,84%.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator .....

Indikator Kinerja Utama		Realisasi 2024	Target 2024 (Akhir Renstra)	%
Persentase Alkom	Perawatan	93.38%	75%	124.51%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024, indikator kinerja persentase perawatan Alkom Polda Sultra telah mencapai target tahun 2024.

Perbandingan realisasi persentase perawatan Alkom Polda Sultra tahun 2024 yaitu target tahun 2024, realisasi tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
75	93.38	93,34	75

#### Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

1. sumber daya manusia:

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polda Sultra dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 walaupun dengan jumlah Alkom dan SDM yang sangat terbatas namun Polda Sultra dapat menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Sultra.

2. sumber daya keuangan:

Indikator persentase perawatan Alkom Polda Sultra Polda Sultra belum terpenuhi dari segi dukungangan anggaran yang terdapat dalam DIPA Polda Sultra sehingga akan dilaksanakan pengajuan anggaran pada T.A. 2025. Namun untuk Dipa persentase perawatan alkom Polda Sultra terdapat pada program modernisasi Almatsus Sarpras Kepolisian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 136.164.271.000,- realisasi sebesar Rp. 133.323.029.695,- atau terealisasi sebesar 97,91%.

**TABEL**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
<b>Terwujudnya modernisasi teknologi</b>					
1	Modernisasi Almatsus dan Sarpras Kepolisian	Persentase perawatan Alkom	124,51	97,91	26,6

*Tingkat efisiensi = capaian kinerja – realisasi anggaran*

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran, sarana prasana dan SDM dalam melaksanakan tugas khususnya dalam pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana Almatsus secara rutin sehingga peralatan Almatsus dapat dipakai setiap saat (siap pakai) dalam melaksanakan tugas-tugas operasional kepolisian.

**Analisis program atau kegiatan** yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil (realisasi) dengan target kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi/hasil untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome* antara yang diharapkan dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Polda Sultra.

Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan diukur dengan tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja, dan tidak tercapainya program kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti: sarana prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya pelatihan dan sosialisasi.

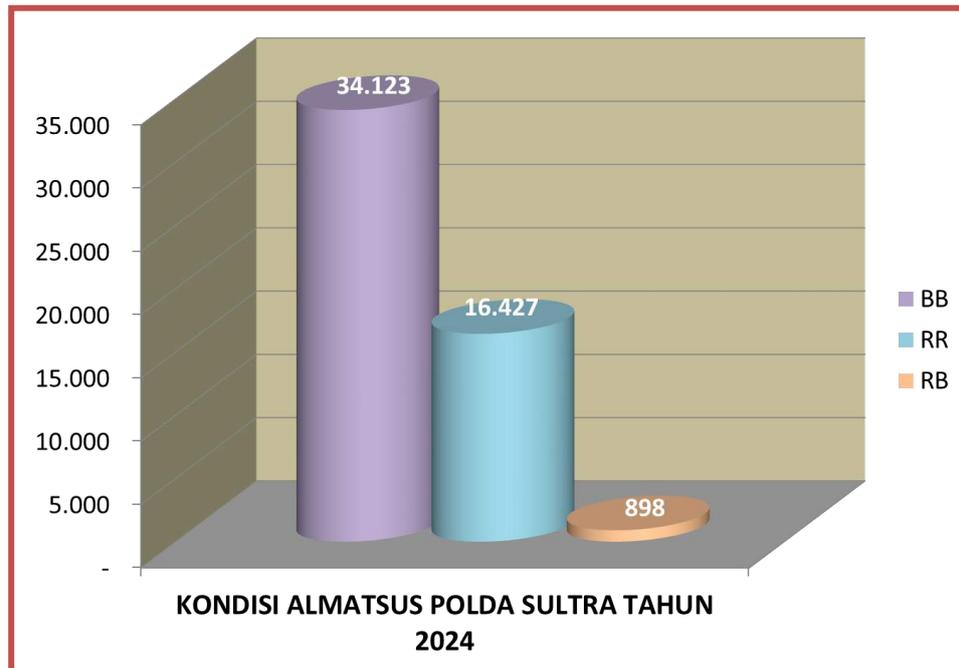
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Almatsus perawatan	75	98.25	131%

Untuk .....

Untuk pencapaian indikator kinerja pada persentase perawatan Almatsus Polda Sultra untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 75% dan terealisasi sebesar 98,25% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 131%. Dalam menentukan perolehan nilai realisasi 98,25% yaitu jumlah total almatsus dalam kondisi baik di tambah dengan jumlah almatsus kondisi rusak ringan dibagi jumlah total almatsus dikali seratus persen atau  $(BB+RR)/JML \times 100\%$ . Dimasukkannya almatsus kondisi rusak ringan pada perhitungan persentase perawatan almatsus dikarenakan almatsus yang tergolong rusak ringan memiliki kerusakan yang tidak terlalu parah, sehingga masih dapat digunakan dengan beberapa penyesuaian atau perbaikan kecil.

NO	PERALATAN ALMATSUS	KONDISI			
		BB	RR	RB	JML
1.	Alat Angkut				
	a. Roda 2	1.890	285	159	2.334
	b. Roda 3	-	-	-	-
	c. Roda 4	365	61	37	463
	d. Roda 6	83	48	4	135
2.	Kendaraan Air				
	a. Kapal Patroli	35	114	11	160
	b. Kapal Non Standar	-	-	-	-
3.	Senpi.				
	a. Genggam	3.337	692	14	4.043
	b. Pinggang.	28	10	-	38
	c. Bahu	2.059	376	579	3.014
	d. Senapan Mesin	21	11	-	32
	e. Anti lapis Baja	10	-	-	10
4.	Alat Persenjataan				
	a. Alat senjata	233	552	1	786
	b. Aljihandak	80	18	1	99
	c. Alat Nuklir KBRN	286	9	-	295
5.	Alat Khusus.				
	Alsus Daktiloskopi	892	-	-	892
	Alat Fotografi	70	-	-	70
	a. Reskrim	62	-	-	62
	b. Alat Dalmas PHH	15.831	14.251	92	30.174
	c. Alwanteror	8.735	-	-	8.735
	d. Intelkam	25	-	-	25
	e. Lantas	81	-	-	81
	<b>Jumlah</b>	<b>34.123</b>	<b>16.427</b>	<b>898</b>	<b>51.448</b>

## GRAFIK



Data tabel dan grafik di atas telah menggambarkan bahwa dari 51.448 data Almatsus Polda Sultra, sebanyak 34.123 almatsus dalam kondisi baik (siap pakai), sebanyak 16.427 Almatsus dalam kondisi rusak ringan dan sebanyak 898 Almatsus dalam kondisi rusak berat.

Dengan peningkatan dan terpenuhinya Almatasus Polda Sultra guna mendukung penguatan Tupoksi Polri sehingga terbangun postur Polri yang profesional, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan terbangunnya teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir maka, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



INDIKATOR KINERJA UTAMA: Persentase Perawatan Almatsus		
TAHUN	REALISASI	CAPAIAN
2020	0	0%
2021	0	0%
2022	99.74	153.44%
2023	99.73	142.47%
2024	98.25	131%

Pada indikator persentase perawatan Almatsus Polda Sultra tahun 2024 terealisasi sebesar 98,25% dengan tingkat capaian sebesar 131% sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 99,73% dengan tingkat capaian sebesar 142,47%.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target 2024 (Akhir Renstra)	%
Persentase Perawatan Almatsus	98.25	75%	131 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024, indikator kinerja persentase perawatan Almatsus Polda Sultra telah mencapai target tahun 2024.

Perbandingan realisasi persentase perawatan Almatsus Polda Sultra tahun 2024 yaitu target tahun 2024, realisasi tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target .....

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
75	98.25	99.73	75

### Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

1. sumber daya manusia:

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polda Sultra dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 walaupun dengan jumlah Almatsus dan SDM yang sangat terbatas namun Polda Sultra dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Sultra.

2. sumber daya keuangan:

Indikator persentase perawatan Almatsus Polda Sultra, telah terpenuhi namun belum maksimal dari segi dukungangan anggaran yang terdapat dalam DIPA Polda Sultra sehingga akan dilaksanakan pengajuan anggaran pada T.A. 2025. Untuk menunjang persentase perawatan Almatsus Polda Sultra maka telah dialokasikan pagu anggaran yang terdapat pada program modernisasi Almatsus Sarpras Kepolisian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 136.164.271.000,- realisasi sebesar Rp. 133.323.029.695,- atau terealisasi sebesar 97,91%.

**TABEL  
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
<b>Terwujudnya modernisasi teknologi</b>					
1	Modernisasi Almatsus dan Sarpras Kepolisian	Persentase perawatan Almatsus	88.44	97.91	-9,47

*Tingkat efisiensi = capaian kinerja – realisasi anggaran*

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran, sarana prasana dan SDM dalam melaksanakan tugas khususnya dalam pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana Almatsus secara rutin sehingga peralatan Almatsus dapat dipakai setiap saat (siap pakai) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepolisian.

**Analisis penyebab keberhasilan** tercapainya target kinerja persentase perawatan almatsus antara lain:

1. dalam penerimaan materiil dari Mabes Polri Polda Sultra membentuk Tim Komisi penerima dan pemeriksa Materiil yang bertugas menerima dan memeriksa kelengkapan dan kondisi materiil yang diterima;
2. materiil yang diterima oleh Polda Sultra didistribusikan ke Satker/Satwil sesuai peruntukannya dan dibuatkan surat pendistribusian;
3. materiil yang diterima Polda Sultra tahun berjalan, anggaran pemeliharaannya akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.
4. Polda Sultra dalam hal ini Birolog selaku satker pembina fungsi melaksanakan supervisi berkala (semester) untuk mengecek kondisi materriil yang telah didistribusikan ke Satker/Satwil.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kegiatan diukur dengan tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja dan tidak tercapainya program kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti: sarana prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya pelatihan dan sosialisasi.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase pemenuhan ADK pada Almatsus</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>133.33%</b>

Untuk pencapaian indikator kinerja pada persentase sarana prasarana Almatsus Polda Sultra yang siap pakai untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 75% dan terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 133,33%. Dibawah ini adalah data pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polda Sultra tahun 2024:

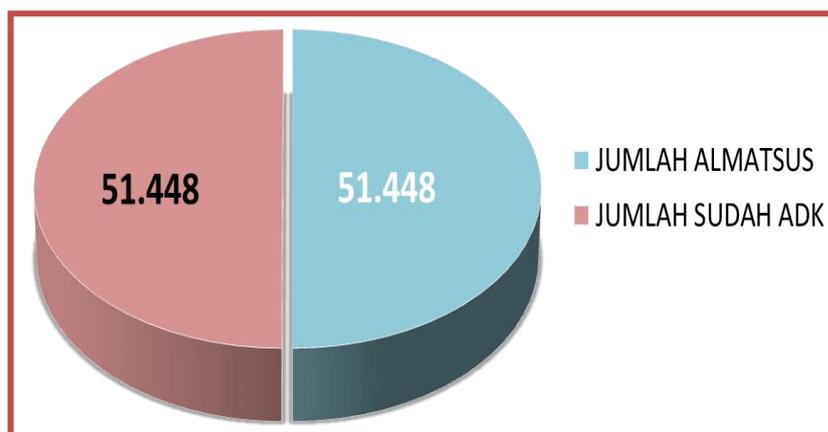
NO	PERALATAN ALMATSUS	KETERANGAN ADK		
		TERSEDIA	TDK TERSEDIA	JML
1.	Alat Angkut			
	a. Roda 2	2.334	-	2.334
	b. Roda 3	-	-	-
	c. Roda 4	463	-	463
	d. Roda 6	135	-	135
	e. Sepeda			
2.	Kendaraan Air			
	a. Kapal Patroli	160	-	160
	b. Kapal Non Standar			
3.	Senpi.			
	a. Genggam	4.043	-	4.043
	b. Pinggang.	38	-	38
	c. Bahu	3.014	-	3.014
	d. Senapan mesin	32	-	32
	e. Anti lapis baja	10	-	10
4.	Alat Persenjataan			
	a. Alat senjata	786	-	786
	b. Aljihandak	99	-	99
	c. Alat Nuklir KBRN	295	-	295
5.	Alat Khusus.			
	Alsus Daktiloskopi	892	-	892
	Alat Fotografi	70	-	70
	a. Reskrim	62	-	62
	b. Alat Dalmas PHH	30.174	-	30.174
	c. Alwanteror	8.735	-	8.735
	d. Intelkam	25	-	25
	e. Lantas	81	-	81
	Jumlah	51.448		51.448

Data tabel di atas telah menggambarkan bahwa dari 51.448 data Almatsus Polda Sultra, semuanya sudah memiliki Administrasi Data Komputer (ADK) dan sudah masuk dalam SIMAK-BMN Polda Sultra tahun 2024.



### DIAGRAM

#### PEMENUHAN ADK ALMATSUS POLDA SULTRA TAHUN 2024



Pentingnya ADK pada suatu Almitsus agar semua peralatan materiil khusus dapat diupload dalam SIMAK BMN sehingga dapat terdukung anggaran dalam hal pemeliharaan/perawatan untuk memperpanjang usia pakai suatu barang.

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir maka, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA: Persentase Pemenuhan ADK pada Almitsus		
TAHUN	REALISASI	CAPAIAN
2020	0	0 %
2021	0	0 %
2022	100	153.84%
2023	100	142.86%
2024	100	133.33%

Pada indikator persentase ketersediaan ADK pada Almitsus Polda Sultra tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 133,33% sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 142,86%.

Untuk .....

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target 2024 (Akhir Renstra)	%
Persentase pemenuhan ADK pada Almatsus	100	75	133.33%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024, indikator kinerja persentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polda Sultra sudah mencapai sebesar 100 % dan sudah mencapai target akhir Renstra (tahun 2024).

Perbandingan realisasi persentase sarana dan prasarana Almatsus Polda Sultra yang siap pakai tahun 2024 yaitu target tahun 2024, realisasi tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
75	100	100	75

**Analisis penyebab tercapainya target** karena setiap pengadaan Almatsus selalu dimintakan ADKnya sehingga tidak terjadi keterlambatan penerbitan ADK dan semua Almatsus Polda Sultra sudah masuk dalam SIMAK BMN.

#### **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:**

1. sumber daya manusia:

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polda Sultra dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 walaupun dengan jumlah Almatsus dan SDM yang sangat terbatas namun Polda Sultra dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Sultra.

2. sumber .....

2. sumber daya keuangan:

Indikator persentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polda Sultra, dukungan anggarannya terdapat dalam program modernisasi Almatsus dan Sarpras Kepolisian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 136.164.271.000,- realisasi sebesar Rp. 133.323.029.695,- atau terealisasi sebesar 97,91%.

**TABEL**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
<b>Terwujudnya modernisasi teknologi</b>					
1	Modernisasi Almatsus dan Sarpras Kepolisian	Persentase pemenuhan ADK pada Almatsus	133.33	97.91	35.42

*Tingkat efisiensi = capaian kinerja – realisasi anggaran*

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran, sarana prasana dan SDM dalam melaksanakan tugas khususnya dalam pemeliharaan /perawatan sarana dan prasarana Almatsus secara rutin sehingga peralatan Almatsus dapat dipakai setiap saat (siap pakai) dalam melaksanakan tugas-tugas operasional kepolisian.

**Analisis program atau kegiatan** yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil (realisasi) dengan target kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi/hasil untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome* antara yang diharapkan dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Polda Sultra. Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Keberhasilan dalam melaksanakan program



kegiatan diukur dengan tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja, dan tidak tercapainya program kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti: sarana prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya pelatihan dan sosialisasi.

**SS.5**

**SISTEM PENGAWASAN YANG AKUNTABEL GUNA  
MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN  
YANG BERSIH, TERBUKA DAN MELAYANI**

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Polda Sultra telah melakukan langkah-langkah sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map reformasi birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, selanjutnya dijabarkan dalam Road Map reformasi birokrasi Polri tahun 2010-2014, 2015-2019, dan yang akan disusun 2020-2024. Saat ini, reformasi birokrasi Polri telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan model birokrasi Polda Sultra yang dapat mewujudkan *world class bureaucracy* dengan indikator Polda Sultra yang bebas KKN, pelayanan prima kepolisian dan tata kelola kepolisian yang semakin efektif dan efisien. Indikator ini menggambarkan sejauhmana Polda Sultra melaksanakan perbaikan tata kelola kepolisian yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam tahun 2024 sasaran tersebut telah diprogramkan dengan 5 (lima) indikator sebagai berikut:

1. nilai Sakip;
2. indeks kepuasan layanan Polda Sultra;
3. nilai kinerja anggaran;
4. persentase penyelesaian pengaduan masyarakat;
5. persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra;

Pengukuran .....

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polda Sultra tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Polda Sultra tahun 2024 dengan realisasinya.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	80.20	79.12	98.65%

Untuk pencapaian indikator kinerja pada nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 80,20 dan terealisasi sebesar 79,12 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,65%. Dalam penilaian Sakip tahun 2024 ada enam produk perencanaan yang nilai yaitu:

1. Rencana Strategi (Renstra) Polda Sultra tahun 2020 – 2024;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Polda Sultra tahun 2020 – 2024;
3. Perjanjian Kinerja (PK) Polda Sultra tahun 2024;
4. Rencana Kerja (Renja) Polda Sultra tahun 2024;
5. Rencana aksi kinerja Polda Sultra tahun 2024;
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Polda Sultra tahun 2023.

Manfaat yang dicapai pada penilaian SAKIP adalah:

1. Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas organisasi yang lebih baik;
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Polda Sultra;
3. Memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan;
4. Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia;
5. Sebagai dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan di lingkungan Polda Sultra;
6. Mengarahkan pada sasaran dan memberikan informasi kinerja;

Penilaian evaluasi AKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP) yang telah di rubah dari Peraturan Menteri PANRB

Nomor .....

Nomor 26 Tahun 2020. Adapun komponen evaluasi penilaian AKIP tahun 2023 yaitu Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Berdasarkan penilaian tersebut maka Polda Sultra mendapatkan rekomendasi nilai seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini:

**TABEL**

NILAI SAKIP POLDA SULTRA TAHUN 2024			
NILAI AKIP	KOMPONEN SAKIP		
79,12	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
	PERENCANAAN KINERJA	30%	23,77
	PENGUKURAN KINERJA	30%	23,75
	PELAPORAN KINERJA	15%	11,85
	EVALUASI KINERJA	25%	19,75
NILAI	100%	79,12	
<b>KATEGORI "BB" SANGAT BAIK</b>			

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi terhadap kinerja suatu instansi pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat yang diberikan oleh masyarakat sebagai pemberi amanat. Berdasarkan penilaian evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Polda Sultra tahun 2024, mendapatkan predikat penilaian kategori “BB” (SANGAT BAIK) dengan nilai 79.12. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Polda Sultra yang terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

**Analisis Penyebab menurunnya kinerja** nilai SAKIP Polda Sultra terdapat pada lembar hasil dan rekomendasi Tim Reviu Itwasum Polri yaitu:

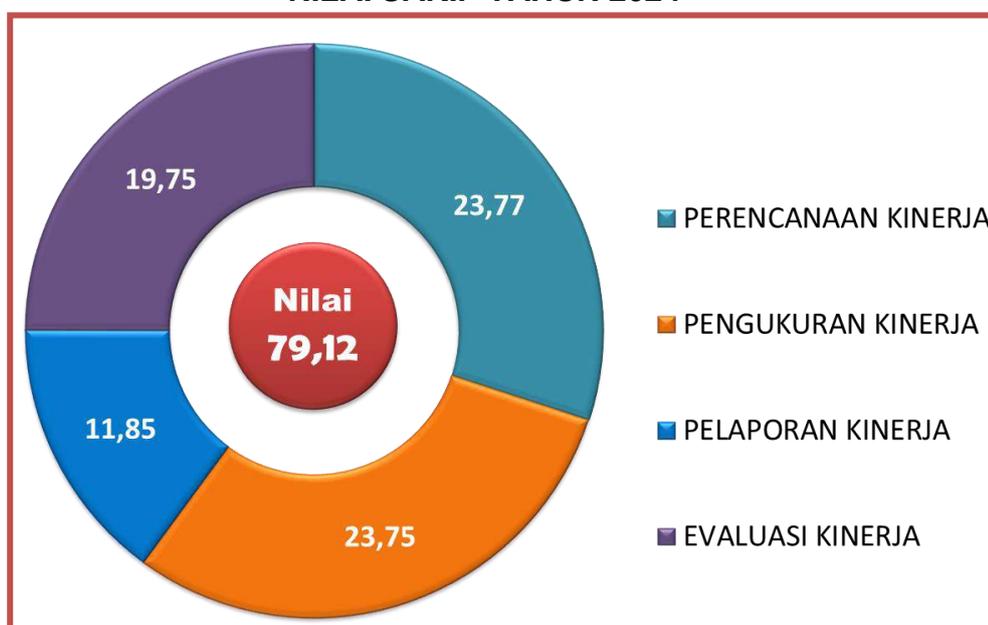
1. agar analisa AOI (Area Of Interest) atau area perbaikan di tindak lanjuti dengan menghasilkan revisi dokumen perencanaan;
2. pada semua unit kerja harus memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja yang ditempuh tepat waktu dan data yang dikumpulkan memiliki kesalahan yang minimal.

Salah .....

Salah satu point rekomendasi perbaikan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polda Sultra adalah penyusunan laporan setiap melaksanakan tugas sehingga dalam evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Polda Sultra, dapat dijadikan salah satu capaian program peningkatan akuntabilitas kinerja, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi dapat direkomendasi perbaikan yang akan ditindaklanjuti guna meningkatkan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Polda Sultra, dengan tujuan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat dievaluasi lebih rinci dan terakhir evaluasi harus dilakukan sebaik-baiknya/teliti dengan tujuan agar tercipta birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN.

### DIAGRAM

#### NILAI SAKIP TAHUN 2024



#### Perbandingan Data Nilai SAKIP Polda Sultra tahun 2023-tahun 2024

NO	KOMPONEN	BOBOT		NILAI SAKIP	
		2023	2024	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30%	30%	24,57	23,77
2	Pengukuran Kinerja	30%	30%	24,59	23,75
3	Pelaporan Kinerja	15%	15%	12,08	11,85
4	Evaluasi Kinerja	25%	25%	18,87	19,75
<b>NILAI HASIL EVALUASI</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80,11</b>	<b>79,12</b>
<b>TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA POLDA SULTRA KATEGORI</b>				<b>A</b>	<b>BB</b>
				<b>MEMUASKAN</b>	<b>SANGAT BAIK</b>
<b>PERSENTASE NAIK/TURUN DARI TAHUN SEBELUMNYA (2023 KE 2024)</b>				<b>-1,24%</b>	

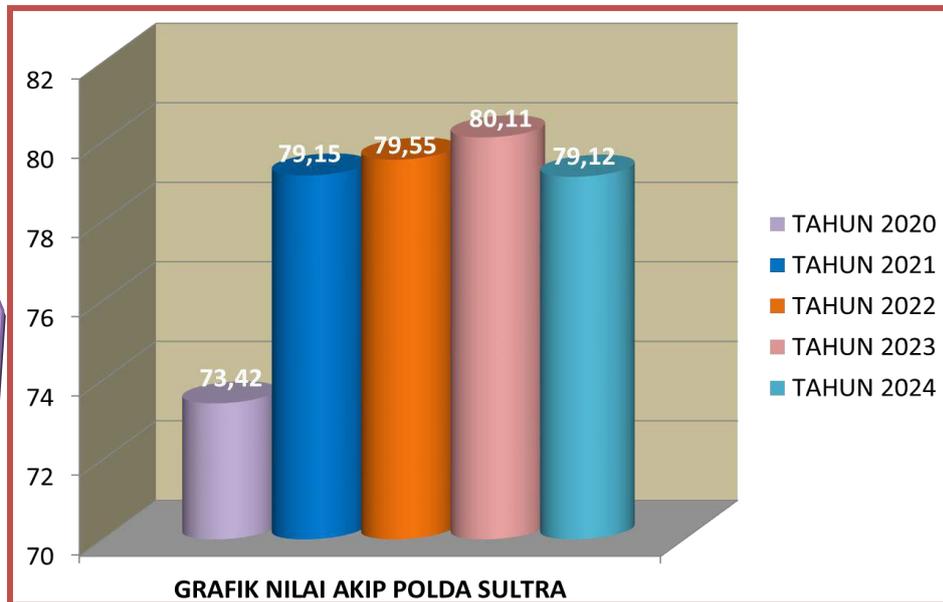
Berdasarkan .....

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Polda Sultra pada tahun 2024 memperoleh nilai 79.12 dengan kategori BB (Sangat Baik) sedangkan pada tahun 2023 Polda Sultra memperoleh nilai 80,11 dengan kategori "A" (Memuaskan).

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir maka, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA: Nilai SAKIP		INDIKATOR ....
TAHUN	REALISASI	CAPAIAN
2020	73.42	96.35%
2021	79.15	102.39%
2022	79.55	101.4%
2023	80.11	102.91%
2024	79.12	98.65%

**GRAFIK PERBANDINGAN NILAI SAKIP**



Untuk ....

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target 2024 (Akhir Renstra)	%
Nilai SAKIP	79.12	80.20	98.65%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024, indikator kinerja nilai SAKIP Polda Sultra baru tercapai sebesar 98,65% dan belum mencapai target akhir renstra (tahun 2024).

Perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2024 yaitu target tahun 2024, realisasi tahun 2023 dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
80.20	79.12	80.11	80.20

**Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja atau peningkatan kinerja Polda Sultra kedepan yaitu sebagai berikut:**

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:**

1. Sumber daya manusia:

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polda Sultra dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 walaupun dengan jumlah personil yang belum sesuai dengan peta jabatan dan DSP yang seharusnya pada Polda Sultra tetapi kinerja yang sudah diperjanjikan tetap bisa dicapai. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen pimpinan yang selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja serta peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan sistem/metode. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Polda Sultra telah meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan:

- a. peningkatan pemahaman terkait program prioritas Kapolri;
- b. melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) baik bidang operasional maupun bidang pembinaan;

c. mengirimkan .....

- c. mengirimkan personil dalam kegiatan pelatihan maupun kejuruan pada fungsi-fungsi kepolisian;
  - d. peningkatan kualitas personil Polda Sultra dengan memberikan dukungan kepada personil yang akan melanjutkan pendidikan pengembangan Polri maupun pendidikan umum seperti S1, S2 dan S3.
2. sumber daya keuangan:

Dukungan anggaran untuk indikator nilai SAKIP Polda Sultra terdapat dalam program dukungan manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 527.314.672.000,-, realisasi sebesar Rp. 523.245.955.678,- atau terealisasi sebesar 99,23%.

**TABEL**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
<b>Sistem pengawasan yang akurat guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani</b>					
1	Dukungam Manajemen	Nilai SAKIP	98.65	99.23	-0,58

*Tingkat efisiensi = capaian kinerja – realisasi anggaran*

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran, sarana prasana dan SDM dalam melaksanakan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Polda Sultra merupakan suatu permasalahan namun personel yang ada telah diberdayakan untuk melakukan tugas-tugas kepolisian secara maksimal, hal ini dapat dilihat bahwa kinerja Polda Sultra setiap tahun semakin baik .

**Analisis program atau kegiatan** yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil (realisasi) dengan target kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi/hasil untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome* antara yang diharapkan dengan



realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Polda Sultra. Untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan diukur dengan tercapainya realisasi target kegiatan dalam satu tahun rencana kerja, dan tidak tercapainya program kegiatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung lainnya seperti: sarana prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya pelatihan dan sosialisasi.

Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya meningkatkan kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Cara yang harus dilakukan meliputi mengubah *mindset* menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat, penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik serta penanganan pengaduan masyarakat.

Untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat, pemerintah telah menerbitkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Sampai dengan saat ini telah banyak yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun hasilnya belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan terutama teknologi dan informasi, yang memerlukan respon yang cepat. Hal ini dapat terwujud apabila aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat secara profesional melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara memuaskan. Pelayanan dapat berjalan dengan optimal bila didukung dengan kapasitas aparatur dan sarana prasarana yang memadai.

Sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan publik telah tercapai yang diukur berdasarkan rata-rata capaian satu indikator sebagai berikut:

Indikator .....

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian
<b>Indeks Kepuasan Layanan</b>	<b>Polda Sultra</b>	<b>82.1</b>	<b>93.14</b>	<b>113.45 %</b>

Untuk pencapaian indikator kinerja pada indeks kepuasan layanan Polda Sultra untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 82,1 dan terealisasi sebesar 93,14 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 113,45%.

Guna mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, khususnya yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, Polda Sultra melakukan pengukuran Indeks Pelayanan Publik.

Pedoman untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat adalah peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dengan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 - 2.5996	25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 - 3.064	65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 - 3.532	76.61 - 88.30	B	Baik
4	3.5324 - 4.00	88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Polda Sultra tahun 2024 mencapai nilai 93,14 dengan mutu pelayan “A” atau unit kinerja pelayanan “SANGAT BAIK”. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah rata-rata responden yang menilai baik dibagi jumlah responden yang terdata pada aplikasi EPZI Januari s.d. Desember (22.195:23.830X100). Adapun jumlah responden yang ikut berpartisipasi dalam pengisian kuesioner penilaian IKM sebanyak 23.830 orang. Dari 23.830 responden yang melaksanakan survey dapat di uraikan sebagai berikut:

1. sebanyak 1.635 responden atau sekitar 6,86% yang belum puas dan cenderung mengatakan kurang baik dengan pelayanan Polda Sultra baik dari segi aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi pelayanan.

2. sebanyak .....

2. sebanyak 22.195 responden atau sekitar 93,14% yang merasa sudah baik dan sangat baik dengan pelayanan Polda Sultra baik dari segi aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan aspek pengaduan, serta aspek inovasi pelayanan.

Dibawah ini adalah gambaran kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik Polda Sultra tahun 2024:



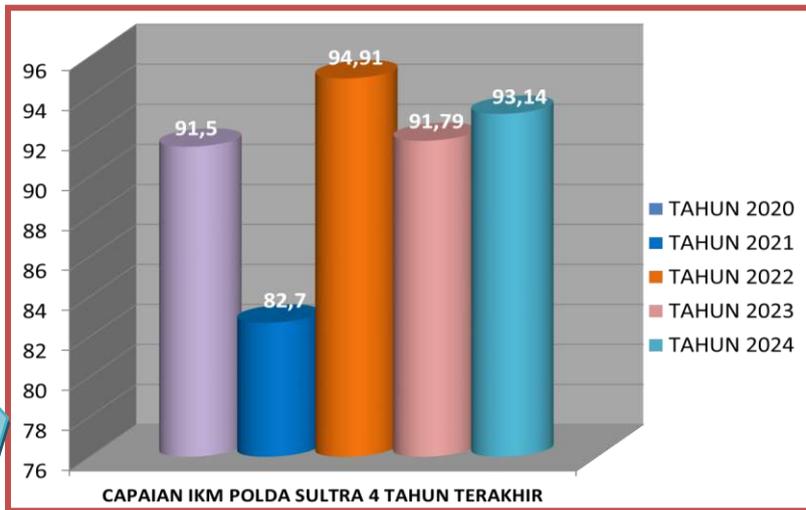
TABEL ....



**TABEL**  
**Perbandingan Nilai IKM Polda Sultra**

NO	NILAI IKM				
	THN 2020	THN 2021	THN 2022	THN 2023	THN 2024
	91.5	82.7	94.91	91.79	93.14

**GRAFIK**



Nilai indeks pelayanan publik yang prima didapatkan dari hasil evaluasi pelayanan publik pada unit pelayanan yang telah ditentukan dengan menggunakan instrumen sesuai PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelayanan publik pada Polda Sultra tahun 2024 mendapatkan nilai 93,14. Nilai ini diharapkan dapat meningkat setiap tahun dan dapat dijadikan pembandingan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dilakukan akumulasi hasil evaluasi Polda Sultra maka didapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 sebesar 93,14 seperti yang tergambar pada grafik diatas.

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa indikator indeks kepuasan layanan Polda Sultra tahun 2024 mencapai nilai 93,14 sedangkan pada tahun 2023 mencapai nilai 91,79.

Nilai .....



Nilai 93,14 pada Indeks Pelayanan (IP) yang indeks pelayanannya “Sangat Baik” merupakan gambaran kinerja pelayanan publik khususnya yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah diperoleh melalui penilaian oleh penyelenggara layanan, *observer* atau *evaluator* dan penilaian oleh pengguna layanan/masyarakat. Penilaian meliputi 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Hasil pengukuran berupa indeks dan kategori menggambarkan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik serta menjadi dasar pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 2009

Berdasarkan KepmenPANRB Nomor 176 Tahun 2018 tentang Penetapan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik tahun 2024, dengan sasaran layanan publik yang dievaluasi tahun 2024 adalah fungsi Lantas (SIM), fungsi Intelkam (SKCK), fungsi Sidokkes (Yankes), fungsi SPKT (Yan terpadu), fungsi Samapta (Patroli dan Pamobvit), fungsi Reskrim (yan tersangka/saksi), fungsi SDM (Yan penerimaan Polri). Dengan demikian, terdapat peningkatan lokus evaluasi layanan publik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ke tujuh sasaran layanan publik ini yang selalu dievaluasi karena ke tujuh layanan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Ke tujuh sasaran layanan publik ini memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara masif dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jika .....

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA: Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra		
TAHUN	REALISASI	CAPAIAN
2020	91,5	119%
2021	82,7	106%
2022	94.91	118.5%
2023	91.79	113.04%
2024	93.14	113.45%

Indikator kinerja indeks kepuasan layanan Polda Sultra tahun 2024 telah terealisasi sebesar 93,14 dengan tingkat capaian sebesar 113,45% sedangkan pada tahun 2023 mencapai nilai 91,79 dengan tingkat capaian sebesar 113,04%.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target 2024 (Akhir Renstra)	%
Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra.	93.14	82.1	113.45%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024 indikator kinerja indeks kepuasan layanan Polda Sultra, telah melebihi dari target tahun 2024 (tahun akhir Renstra).

Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra tahun 2024 yaitu target tahun 2024, realisasi tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
82.1	93.14	91.79	82.1

Untuk mencapai target, Satker jajaran Polda Sultra yang melaksanakan pelayanan publik lebih proaktif memberikan kenyamanan dalam melayani masyarakat baik dari segi sarana prasarana maupun dari kualitas SDM yang melayani.

**Berdasarkan analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja,** berbagai upaya yang dilakukan Polda Sultra untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari penemuan cara-cara baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis, dan penyelenggara pelayanan harus melakukan terobosan secara berkelanjutan yang bertujuan agar setiap Satuan Fungsi (Satfung) menghasilkan inovasi setiap tahun.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:**

1. sumber daya manusia

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polda Sultra dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 walaupun dengan jumlah personil yang belum sesuai dengan peta jabatan yang seharusnya pada Polda Sultra tetapi kinerja yang sudah diperjanjikan tetap bisa dicapai. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen pimpinan yang selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja serta peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan sistem/metode. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Polda Sultra telah meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan:

- a. peningkatan pemahaman terkait program prioritas Kapolri;
- b. melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) baik bidang operasional maupun bidang pembinaan;
- c. mengirimkan personil dalam kegiatan pelatihan maupun kejuruan pada fungsi-fungsi kepolisian;

d. peningkatan ....

- d. peningkatan kualitas personil Polda Sultra dengan memberikan dukungan kepada personil yang akan melanjutkan pendidikan pengembangan Polri maupun pendidikan umum seperti S1, S2 dan S3.
2. sumber daya keuangan

Indikator kepuasan layanan Polda Sultra didukung dari anggaran program Harkamtibmas Polda Sultra dengan pagu anggaran sebesar Rp. 446.975.008.000,-, realisasi sebesar Rp. 442.290.122.898,- atau terealisasi sebesar 98,95%.

**TABEL**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATO R KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFESIENSI
<b>Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani</b>					
1	Harkamtibmas	Indeks kepuasan layanan Polda Sultra	113.45	98.95	14,5

*Tingkat efisiensi = capaian kinerja – realisasi anggaran*

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran, sarana prasana dan SDM dalam melaksanakan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Fungsi (Satfung) dalam melakukan pelayanan publik mengharuskan untuk melakukan optimalisasi terhadap pemanfaatan personil yang tersedia. Ketimpangan jumlah personil yang mempunyai kompetensi teknis memadai dengan beban kerja yang masih cukup besar dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan petugas layanan publik dapat berjalan sesuai dengan SOP pelayanan publik. Ketersedian sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan publik akan mempercepat pelayanan dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja** yaitu:

1. melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi/lembaga pemerintah yang terkait;
2. meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan SOP;
3. melaksanakan sertifikasi kepada personel yang terlibat langsung dalam pelayanan publik;
4. melaksanakan pemetaan data permasalahan sosial yang menjadi perhatian pelayanan publik di Polres jajaran.

**Kendala:** Dalam hal pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP), Polda Sultra (Polres) telah melakukan koordinasi dengan Pemkab. Untuk Mal Pelayanan Publik hanya satu Kabupaten yang memiliki yaitu Kab. Bombana.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran	90.6	91.66	101.17%

Untuk pencapaian indikator kinerja pada nilai kinerja anggaran untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 90.6 dan terealisasi sebesar 91.66 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,17%.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan telah terjadi dalam suatu organisasi atau lembaga, khususnya dalam konteks pengelolaan anggaran. Implementasi NKA bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya finansial yang diberikan kepada suatu lembaga pemerintahan.

Implementasi Nilai Kinerja Anggaran merupakan suatu langkah penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas lembaga negara, serta berkontribusi pada terwujudnya good governance. Kesuksesan implementasi NKA sangat tergantung pada komitmen, partisipasi, dan keterlibatan semua pihak terkait.

Tujuan Pengukuran nilai kinerja anggaran (NKA):

1. Evaluasi .....

- 
1. Evaluasi Efektivitas Program atau Kegiatan dalam menentukan sejauh mana suatu program atau kegiatan memberikan hasil yang diharapkan;
  2. Optimasi Penggunaan Sumber Daya yaitu melalui pengukuran NKA, lembaga dapat mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya finansial, manusia, dan fisik. Hal ini memungkinkan lembaga untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam penggunaan sumber daya dan mengoptimalkan alokasi anggaran.
  3. Akuntabilitas dan Transparansi yaitu Dengan menyajikan hasil kinerja secara terbuka, lembaga menunjukkan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penggunaan dana publik;
  4. Pengambilan Keputusan yang Informasional Hasil dari pengukuran NKA memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan pemahaman tentang kinerja yang tepat berbasis data;
  5. Perbaikan dan Pengembangan yaitu data kinerja yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut;
  6. Meningkatkan Akuntabilitas Pribadi dan Organisasi Dengan menetapkan target kinerja dan mengukur pencapaian terhadap target tersebut, individu dan lembaga dapat lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Tahun 2024 penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) melalui Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yaitu merupakan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan atas *outcome* (keluaran) yang bersiat strategis dan prioritas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 tahun 2023 hasil Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

1. nilai kinerja anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan sangat baik;
2. nilai kinerja anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dikategorikan dengan baik;

3. nilai .....

3. nilai kinerja anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) dikategorikan dengan cukup;
4. nilai kinerja anggaran lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) dikategorikan dengan kurang; dan
5. nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 (lima puluh) dikategorikan dengan sangat kurang.

Hasil Nilai Kinerja Anggaran Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 tahun 2023 diperoleh dari penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran (EKA-SMART) dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA).

Per tanggal 28 Januari 2025 Direktorat Jenderal Keuangan (DJA) Kemenkeu-RI melakukan penutupan sementara aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi) sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja anggaran tahun 2024. Langkah ini diambil sebagai tindakan preventif untuk memberikan waktu dan ruang bagi tim evaluasi untuk melakukan analisis mendalam terhadap data keuangan yang tercatat dalam sistem selama tahun anggaran tersebut. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap hasil evaluasi yang diperoleh dari penutupan aplikasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan sistem, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan negara di masa mendatang.

Adapun hasil dari analisis dan evaluasi kinerja anggaran atas perencanaan anggaran (EKA-SMART) selama tahun 2024 dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Poldasultra maka diperoleh nilai seperti tabel di bawah ini:

**TABEL**  
**NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN**

NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Efektivitas Capaian RO	Efisiensi		NK Perencanaan Anggaran
				Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
	060029	POLDA SULAWESI TENGGARA	98,06	57,39	52,79	87,2

Sementara Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Poldasultra T.A. 2023 memperoleh nilai seperti tabel berikut:

**TABEL .....**

**TABEL NILAI IKPA**

Kode Satker	SATKER	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Dispensasi SPM (Pengurang)	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output			
060029	POLDA SULTRA	Nilai	98,97	77,91	98,89	89,54	89,74	96,60	99,95	0	100	96,12
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25			
		Nilai Akhir	9,90	11,69	19,28	8,95	8,97	9,66	24,41			
		Nilai Aspek	88,45		99,44			97,63				

**TABEL NKA POLDA SULTRA TAHUN 2024**

NILAI KINERJA (SMART-DJA)	<b>87,20</b>	X	50%	43,60
IKPA (OMSPAN DJPB)	<b>96,12</b>	X	50%	48,06
<b>NKA POLDA SULTRA</b>				<b>91,66</b>
<b>KATEGORI "SANGAT BAIK"</b>				

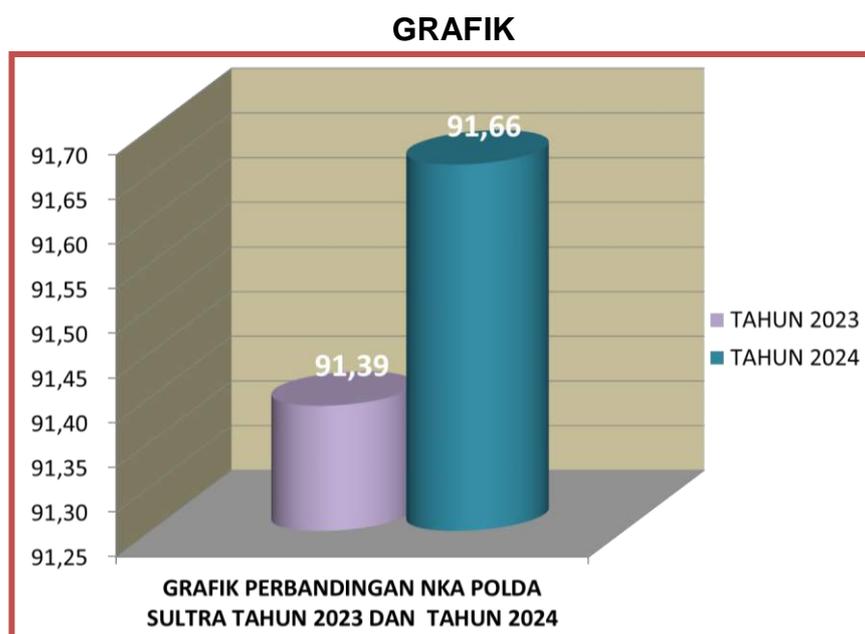
RUMUS:  $NKA = (\text{Nilai Kinerja EKA SMART} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA OMSPAN-DJPB} \times 50\%)$

**DIAGRAM**



Nilai kinerja anggaran Polda Sultra tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2023, dimana pada tahun anggaran 2023 nilai kinerja pelaksanaan anggaran Polda Sultra sebesar 91.39 sedangkan .....

sedangkan pada tahun anggaran 2024 sebesar 91.66, sebagaimana di gambarkan pada grafik di bawah ini:



Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir maka, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA: Nilai Kinerja Anggaran		
TAHUN	REALISASI	CAPAIAN
2020	93.2	104%
2021	93.93	104.83%
2022	95.08	105.52%
2023	91.39	101.21%
2024	91.66	101.17%

Indikator nilai kinerja anggaran Poldasultra tahun 2024 telah terealisasi sebesar 91,66 dengan tingkat capaian 101,17% sedangkan pada tahun 2023 tingkat realisasi sebesar 91,39 dengan tingkat capaian sebesar 101,21%.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Poldasultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target 2024 (Akhir Renstra)	%
Nilai Kinerja Anggaran	91.66	90.6	101.17%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024, indikator kinerja pelaksanaan anggaran Poldasultra telah tercapai sebesar 91.66 dan telah melebihi target tahun 2024 (tahun akhir Renstra).

Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 yaitu target tahun 2024, realisasi tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
90.6	91.66	91.39	90.6

**Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan dalam mencapai target**, maka Poldasultra telah melakukan langkah-langkah strategis dalam percepatan penyerapan anggaran tahun 2024 yaitu:

1. melakukan evaluasi terhadap 8 komponen penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dan memberikan teguran kepada Satker yang kurang teliti khususnya dalam bidang keuangan dan perencanaan;
2. Melakukan pelaporan capaian *output* melalui aplikasi SAKTI tepat waktu yaitu 5 (lima) hari kerja di awal bulan;
3. dalam pencairan anggaran selalu mempedomani Rencana Penarikan Dana (RPD);
4. meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan SPM.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:**

1. sumber daya manusia:

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Poldasultra dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 walaupun dengan jumlah personil yang belum sesuai dengan peta jabatan yang seharusnya pada Poldasultra tetapi kinerja .....

kinerja yang sudah diperjanjikan tetap bisa dicapai. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen pimpinan yang selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja serta peningkatan di bidang pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan sistem/metode. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Polda Sultra telah meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan:

- a. peningkatan pemahaman terkait program prioritas Kapolri;
- b. melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) baik bidang operasional maupun bidang pembinaan;
- c. mengirimkan personil dalam kegiatan pelatihan maupun kejuruan pada fungsi-fungsi kepolisian;
- d. peningkatan kualitas personil Polda Sultra dengan memberikan dukungan kepada personil yang akan melanjutkan pendidikan pengembangan Polri maupun pendidikan umum seperti S1, S2 dan S3.

2. sumber daya keuangan:

Indikator nilai kinerja anggaran didukung dari DIPA Polda Sultra pada ke lima program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.226.125.297.000,-realisasi sebesar Rp. 1.213.908.925.623,- atau terealisasi sebesar 99,00%.

**TABEL**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATO R KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
<b>Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani</b>					
1.	Profesionalisme SDM Polri	Nilai Kinerja Anggaran	101.17	99.00	2.17
2.	Lidik Sidik Tindak Pidana				
3.	Modernisasi Almatsus dan Sarpras Kepolisian				
4.	Harkamtibmas				
5.	Dukungan Manajemen				

*Tingkat efisiensi = capaian kinerja – realisasi anggaran*

Dalam .....



Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja.

**Ada beberapa analisis program atau kegiatan** yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Polda Sultra yaitu:

1. dalam pengelolaan anggaran wajib mempedomani prinsip ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*capacity building*) pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengadaan barang/jasa serta reviu laporan keuangan;
3. meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dalam realisasi pembayaran dan memastikan ketetapan waktu penyelesaian tagihan;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap penginputan capaian rincian *uotput* terhadap target volume rincian *output*;
5. meningkatkan ketertiban terutama waktu penyampaian data *supplier* dan data kontrak termasuk *addendum* kontrak sesuai ketentuan kepada KPPN;
6. mempedomani sasaran prioritas dalam Renstra, Renja serta target *output* dan *outcome* kinerja satker T.A. 2022 yang telah ditetapkan dalam RKA dan DIPA Satker termasuk program prioritas Kapolri.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	93	97.4	105%

Untuk pencapaian indikator kinerja pada persentase penyelesaian pengaduan masyarakat untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 93% dan terealisasi sebesar 97.4% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105%.

Dibawah .....

Dibawah ini adalah data substansi permasalahan yang menjadi objek pengaduan masyarakat:

PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT POLDA SULTRA TAHUN 2024				
% SELESAI PENGADUAN MASYARAKAT	SUBSTANSI PERMASALAHAN			
	SUBSTANSI	LAPOR	SELESAI	% SELESAI
<b>97,4%</b>	HUKUM / HAM	57	55	96%
	LAHGUN WEWENANG	6	6	100%
	YANMAS	2	2	100%
	KEWASPADAAN NASIONAL			
	PERSONEL	9	9	100%
	PUNGLI / KORUPSI	3	3	100%
	TATA LAKSANA/REGULASI			
	TANAH / RUMAH			
	LINGKUNGAN HIDUP UMUM			
	JUMLAH	77	75	97,4%
<b>KATEGORI SANGAT BAIK</b>				
<b>DALAM PROSES SEBANYAK</b>		<b>2</b>	<b>KASUS</b>	

N O	SUBSTANSI PERMASALAHAN	L	S	SELESAI		P	KET
				SB	STB		
1	LAHGUN WEWENANG	6	6	1	5		
2	YANMAS	2	2		2		
3	PUNGLI/KORUPSI	3	3	1	2		
4	PERSONEL	9	9		9		
5	TANAH/ RUMAH						
6	HUKUM/HAM	57	55	6	49	2	
7	KEWASPADAAN NASIONAL						
8	TATA LAKSANA/REGULASI						
9	LINGKUNGAN HIDUP						
10	UMUM						
	<b>JUMLAH</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>8</b>	<b>67</b>	<b>2</b>	

**Tabel dan Grafik Sumber komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polda Sultra**

N O	SUMBER LAPORAN	L	S	SELESAI		P	KET
				SB	STB		
1	ITWASUM POLRI	7	7	1	6		
2	KOMNAS HAM	1	1		1		
3	OMBUDSMAN RI						
4	OMBUDSMAN SULTRA	4	4		4		
5	KOMPOLNAS	12	12	1	11		
6	LSM	2	2		2		
7	KEMENSETNEG						
8	KEMENKUMHAM						
9	MASYARAKAT	30	30	3	27		
10	PT/CV/FIRMA	1	1	1			
11	ADVOKAT / LBH	16	14	1	13	2	
12	KEJAKSAAN NEGERI						
13	KELOMPOK	1	1		1		
14	FORUM/FRONT						
15	KOMISI/KOMITE						
16	LAIN-LAIN	3	3	1	2		
	<b>JUMLAH</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>8</b>	<b>67</b>	<b>2</b>	

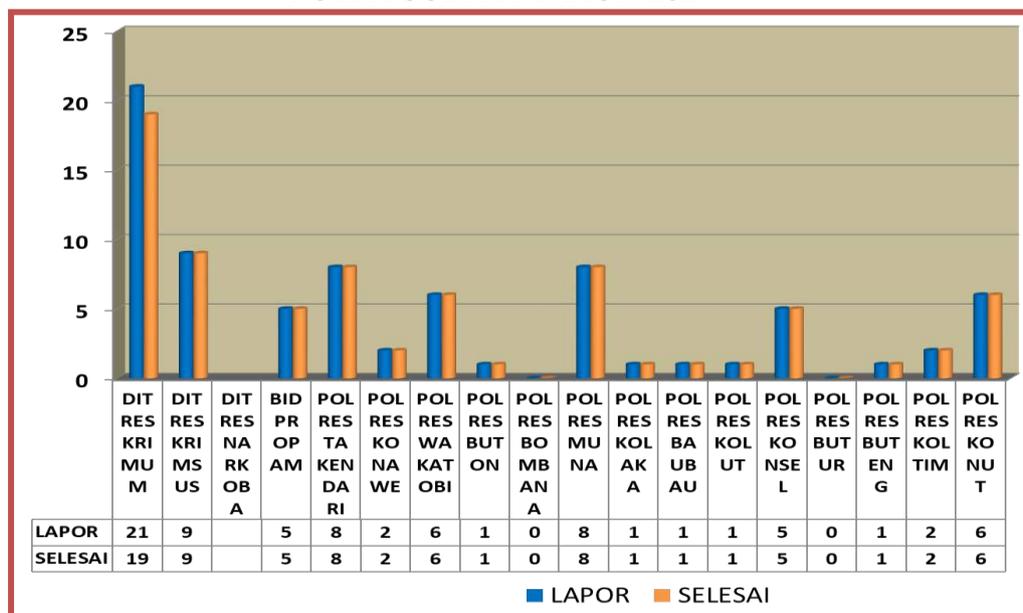
Data .....

**Data  
Penyelesaian Komplain/Pengaduan Masyarakat  
Terhadap Pelayanan Polda Sultra Tahun 2024**

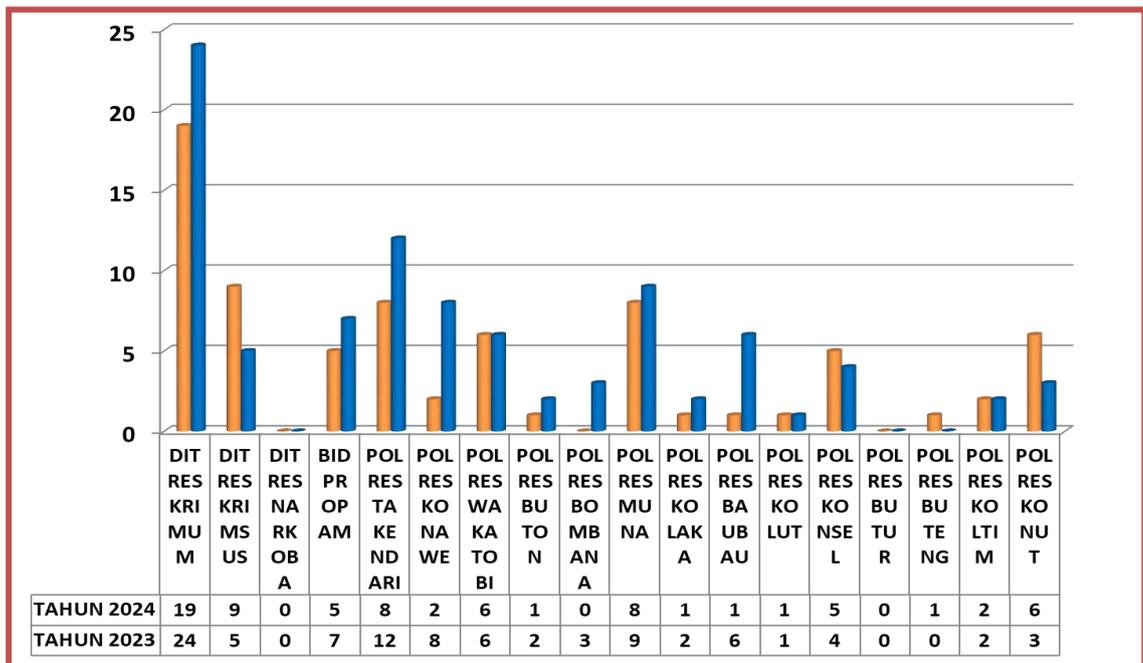
NO	SATKER	L	S	SELESAI		P	KET
				SB	STB		
1	DITRESKRIMUM	21	19	3	16	2	
2	DITRESKRIMSUS	9	9	2	7		
3	DITRESNARKOBA						
4	BID PROPAM	5	5	1	4		
5	POLRESTA KENDARI	8	8		8		
6	POLRES KONAWE	2	2		2		
7	POLRES WAKATOBI	6	6	1	5		
8	POLRES BUTON	1	1		1		
9	POLRES BOMBANA						
10	POLRES MUNA	8	8		8		
11	POLRES KOLAKA	1	1		1		
12	POLRES BAUBAU	1	1		1		
13	POLRES KOLUT	1	1		1		
14	POLRES KONSEL	5	5		5		
15	POLRES BUTUR						
15	POLRES BUTENG	1	1	1			
15	POLRES KOLTIM	2	2		2		
16	POLRES KONUT	6	6		6		
<b>JUMLAH</b>		<b>77</b>	<b>75</b>	<b>8</b>	<b>67</b>	<b>2</b>	

KETERANGAN		
JUMLAH PENGADUAN	:	77
SELESAI	:	75
SB (SELESAI BENAR)	:	8
STB (SELESAI TIDAK BENAR)	:	67
PROSES	:	2
PERSENTASE PENYELESAIAN	:	97,4

**GRAFIK  
PENYELESAIAN KOMPLAIN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP  
POLDA SULTRA TAHUN 2024**



**Perbandingan data penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polda Sultra tahun 2023 dan 2024**



Jumlah komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polda Sultra pada tahun 2024 sebanyak 77 pengaduan dengan rincian Selesai Benar (SB) sebanyak 8 kasus, Selesai Tidak Benar (STB) sebanyak 67 kasus dan sedang proses sebanyak 2 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka tingkat penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polda Sultra mengalami penurunan yaitu jumlah pengaduan pada tahun 2024 sebanyak 77 pengaduan sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 279 pengaduan atau mengalami penurunan sebesar 72,40% dan tingkat penyelesaian komplain/pengaduan pada tahun 2024 sebesar 97,4% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 96,42%. Sehingga penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik pada tahun 2024 naik sebesar 1,02% dari tahun 2023.

Dari 77 pengaduan yang diterima Polda Sultra, maka substansi permasalahan Hukum/HAM menduduki peringkat pertama yaitu sebanyak 57 pengaduan, personel menduduki peringkat ke dua dengan jumlah pengaduan sebanyak 9 pengaduan dan penyalahgunaan wewenang menduduki peringkat ketiga dengan jumlah pengaduan sebanyak 6 pengaduan.

Dari seluruh pengaduan di atas telah dilakukan penelaahan dan kodefikasi/penggolongan jenis masalah yang dilaporkan oleh masyarakat selama tahun 2024.

Selain.....

Selain itu dengan adanya komplain dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan berarti masyarakat peka dan proaktif terhadap pelayanan Polri, sehingga perlu dilakukan revolusi mental untuk memperbaiki kinerja Polri, dengan harapan kinerja Polda Sultra kedepan lebih profesional dan terdepan dalam pengayoman masyarakat.

Permasalahan yang menjadi objek pengaduan masyarakat pada tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa substansi permasalahan Hukum/HAM merupakan permasalahan yang terbesar yaitu sebanyak 57 pengaduan.

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA: Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat		
TAHUN	REALISASI	CAPAIAN
2020	97	105%
2021	92	100%
2022	96	104.34%
2023	96.42	103.22%
2024	97.4	105%

Jika dibandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 pada indikator kinerja persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri dengan tahun 2023 maka terjadi kenaikan persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri yaitu 103,22% pada tahun 2023 dan 105% pada tahun 2024 atau terjadi kenaikan sebesar 1,72%.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target 2024 (Akhir Renstra)	%
Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	97.4%	93%	105%

Berdasarkan .....

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024, indikator kinerja persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri sebesar 97,4% dan telah mencapai target akhir renstra (tahun 2024) dengan capaian 105%.

Perbandingan realisasi Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tahun 2024 yaitu target tahun 2024, realisasi tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
93 %	97.4	96.42	93

**Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja** yang telah dilakukan dalam mencapai target Polda Sultra tetap berupaya untuk menurunkan angka pengaduan yang masuk dengan upaya:

1. peningkatan transparansi penanganan kasus terhadap laporan yang masuk dan yang telah ditangani;
2. menindaklanjuti laporan yang masuk dengan melakukan pemeriksaan secara objektif sesuai dengan pelanggaran dengan tidak memberikan peluang kepada pemeriksa untuk melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme untuk dapat mencegah anggota Polri/PNS melakukan pelanggaran;
3. memberikan pelayanan pengaduan kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip cepat, mudah serta bersifat terbuka sehingga masyarakat tidak ada rasa takut untuk melaporkan pelanggaran personel;
4. meningkatkan layanan pengaduan masyarakat secara *online* melalui aplikasi Dumas Presisi, SP4N Lapor dan *Hotline* serta melalui e-mail **[dumasan.itwasda.poldasultra@gmail.com](mailto:dumasan.itwasda.poldasultra@gmail.com)**

Polda Sultra masih mengalami kendala dalam melakukan penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri adalah:

1. Birokrasi dalam surat menyurat kepada Satker jajaran Polda Sultra yang menjadi objek yang diadukan membuat terlambatnya dalam menjawab pengaduan masyarakat;

2. Satker .....

- 
2. Satker jajaran Polda Sultra yang menjadi objek aduan tidak segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang diterima;
  3. Satker jajaran Polda Sultra yang menjadi objek aduan tidak mau diklarifikasi langsung.

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja.

#### **Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya:**

1. sumber daya manusia:

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polda Sultra dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 walaupun dengan jumlah personil yang belum sesuai dengan peta jabatan yang seharusnya pada Polda Sultra tetapi kinerja yang sudah diperjanjikan tetap bisa dicapai. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen pimpinan yang selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja serta peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan sistem/metode. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Polda Sultra telah meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan:

- a. peningkatan pemahaman terkait program prioritas Kapolri;
  - b. melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) baik bidang operasional maupun bidang pembinaan;
  - c. mengirimkan personil dalam kegiatan pelatihan maupun kejuruan pada fungsi-fungsi kepolisian;
  - d. peningkatan kualitas personil Polda Sultra dengan memberikan dukungan kepada personil yang akan melanjutkan pendidikan pengembangan Polri maupun pendidikan umum seperti S1, S2 dan S3.
2. sumber daya keuangan:

Indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat didukung dari program dukungan manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 527.314.672.000,-, realisasi sebesar Rp. 523.245.955.678,- atau terealisasi sebesar 99,23%.

TABEL .....



**TABEL**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
<b>Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani</b>					
1	Dukungan Manajemen	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	105	99.23	5.77

*Tingkat efisiensi = capaian kinerja – realisasi anggaran*

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran, sarana prasana dan SDM dalam melaksanakan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja. Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja.

**Ada beberapa analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan** pencapaian pernyataan kinerja Polda Sultra yaitu:

1. menempatkan personel Polri di bidang penyidikan bagi lulusan S1;
2. memberikan pelatihan kepada personel/operator seiring dengan kemajuan teknologi guna menunjang dan menambah pengetahuan sehingga dapat mengerti, memahami tugasnya dalam melayani masyarakat dan dalam menyelesaikan komplain/pengaduan masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan tanpa ada rasa takut dalam melaporkan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri;
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan solidaritas kesatuan melalui penerangan internal dan eksternal (dengan melakukan pemasangan banner/spanduk, mengoptimalkan IT dan *website* layanan pengaduan masyarakat, dll);
4. membangun kemitraan melalui kerjasama dengan *stakeholder* terkait maupun media massa (media elektronik, media cetak dan media *online*);
5. percepatan pelayanan terhadap layanan pengaduan masyarakat publik melalui pelaksanaan *quick response* komplain masyarakat terhadap Polri;

6. meningkatkan....

6. meningkatkan kemampuan personel dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan audit investigasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap Polri;
7. penanganan laporan pengaduan dengan mengedepankan proses mediasi antara pelapor dan terlapor;
8. melakukan pengawasan yang intensif dengan memberdayakan peran dan fungsi wasidik untuk melaksanakan pengawasan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana sehingga dapat meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh oknum anggota dalam melaksanakan penyidikan yang menjadi sumber penyebab laporan pengaduan dari masyarakat;
9. adanya layanan pengaduan masyarakat secara online melalui aplikasi Dumas Presisi, SP4N Lapor dan *Hotline* serta melalui e-mail [dumasan.itwasda.poldasultra@gmail.com](mailto:dumasan.itwasda.poldasultra@gmail.com).

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polda Sultra	95	99.4	104.6%

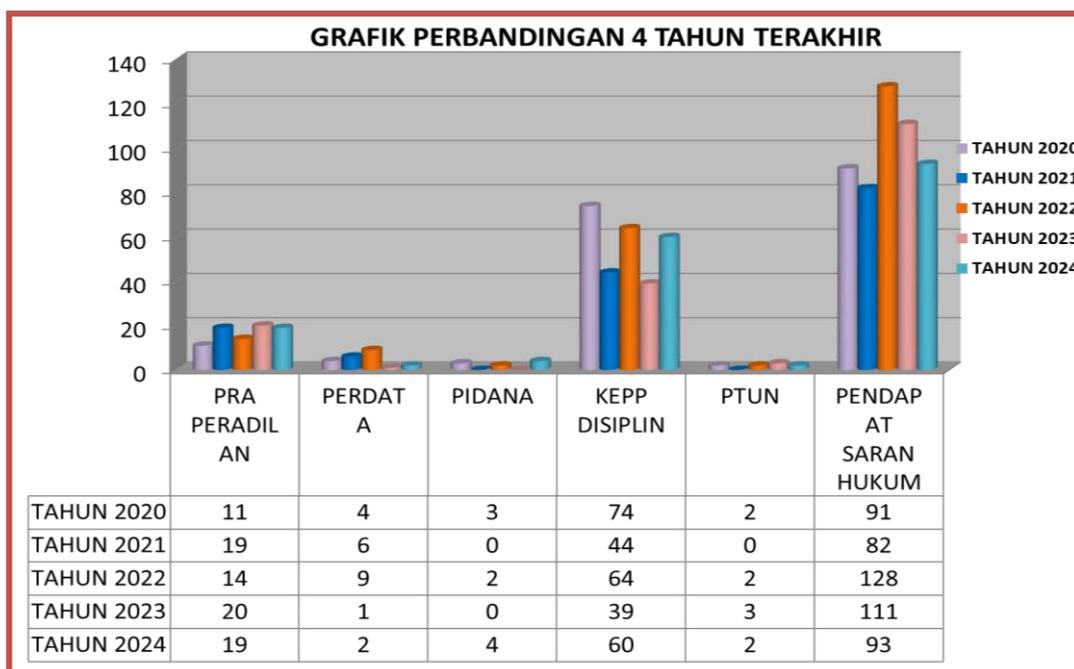
Untuk pencapaian indikator kinerja pada persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 95% dan terealisasi sebesar 99.4% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104.6%.

PERSENTASE PENYELESAIAN MASALAH HUKUM POLDA SULTRA TAHUN 2024				
% SELESAI MASALAH HUKUM	PEMBERIAN ADVOKASI HUKUM			
	JENIS ADKUM	LAPOR	SELESAI	% SELESAI
<b>99,4%</b>	PRA PERADILAN	19	19	100,0%
	PERDATA	2	2	100,0%
	PIDANA	4	4	100,0%
	KEPP /DISIPLIN	60	60	100,0%
	PTUN	2	1	50,0%
	PENDAPAT SARAN HUKUM	93	93	100,0%
	JUMLAH	180	179	99,4%
<b>KATEGORI SANGAT BAIK</b>				
<b>DALAM PROSES SEBANYAK</b>		<b>1 KASUS</b>		

**Perbandingan data**  
**PERSENTASE PENYELESAIAN MASALAH HUKUM YANG DIHADAPI**  
**POLDA SULTRA**

TAHUN 2023				TAHUN 2024			
JENIS ADKUM	LAPOR	SELESAI	% SELESAI	JENIS ADKUM	LAPOR	SELESAI	% SELESAI
PRA PERADILAN	20	20	100,0%	PRA PERADILAN	19	19	100,0%
PERDATA	1	0	0,0%	PERDATA	2	2	100,0%
PIDANA	-	-	-	PIDANA	4	4	-
KEPP /DISIPLIN	39	39	100,0%	KEPP /DISIPLIN	60	60	100,0%
PTUN	3	3	100,0%	PTUN	2	1	50,0%
PENDAPAT SARAN HUKUM	111	111	100,0%	PENDAPAT SARAN HUKUM	93	93	100,0%
JUMLAH	174	173	99,4%	JUMLAH	180	179	99,4%

**JUMLAH KASUS TAHUN 2024 NAIK SEBESAR 3,45% YAITU 174 KASUS PADA TAHUN 2023 SEDANGKAN TAHUN 2024 SEBANYAK 180 KASUS**



Berdasarkan tabel dan grafik di atas bahwa untuk penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra selama tahun 2024 sangat baik karena penyelesaiannya mencapai 99,4%. Untuk laporan, pada tahun 2023 Polda Sultra menerima laporan masalah hukum sebanyak 174 laporan dan yang diselesaikan sebanyak 173 laporan atau selesai sebesar 99,4%, sedangkan pada tahun 2024, Polda Sultra menerima laporan masalah hukum sebanyak 180 laporan dan yang diselesaikan sebanyak 179 laporan atau selesai sebesar 99,4%.

Jika .....

Jika dibandingkan antara tahun 2024 dengan tahun 2023 maka laporan masalah hukum yang diterima Polda Sultra bertambah sebanyak 6 laporan atau naik sebesar 3,45% dari tahun 2023, sedangkan tingkat penyelesaian laporan tahun 2024 dan tahun 2023 memiliki persentase yang sama yaitu 99,4%.

Jika membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA: Persentase Penyelesaian Masalah Hukum Yang Dihadapi Polda Sultra		
TAHUN	REALISASI	CAPAIAN
2020	99 %	106%
2021	99 %	106%
2022	96.8 %	103%
2023	99.4%	106%
2024	99.4%	104.6%

Untuk tahun 2024 pada indikator kinerja persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra memiliki persentase yang sama hal ini disebabkan oleh jumlah penyelesaian kasus yang masing-masing menyisakan 1 (satu) kasus yang masih dalam proses.

Untuk membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Polda Sultra maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2024	Target 2024 (Akhir Renstra)	%
Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polda Sultra	99.4%	95%	104,6%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024, indikator kinerja persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra telah tercapai sebesar 99,4% dan telah memenuhi target akhir renstra (tahun 2024) dengan capaian yaitu 104,6%.

Perbandingan .....

Perbandingan realisasi persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra tahun 2024 yaitu target tahun 2024, realisasi tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target 2024 (Akhir Renstra)
95	99.4	99.4	95

**Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan dalam mencapai target tentang masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra, bahwa Polda Sultra tetap berupaya untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi dengan upaya:**

1. melakukan gelar perkara terkait dengan perkara yang akan dihadapi di pengadilan negeri berhubungan dengan kasus pra peradilan, PTUN, perdata dan kasus pidana;
2. memberikan bantuan hukum terhadap personel Polri dan keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

Ada beberapa kendala yang dialami Subsatker Sikum Polda Sultra dalam melakukan penyelesaian masalah hukum yaitu:

1. anggaran untuk operasional Sikum masih belum mencukupi khususnya anggaran Banhatkum;
2. kurangnya personel yang sudah mengikuti pelatihan PKPA dan yang memiliki pendidikan S1 Hukum;
3. kendaraan operasional R4 untuk Banhatkum belum ada.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:**

1. sumber daya manusia:

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polda Sultra dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 walaupun dengan jumlah personil yang belum sesuai dengan peta jabatan yang seharusnya pada Polda Sultra tetapi kinerja yang sudah diperjanjikan tetap bisa dicapai. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen pimpinan yang selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja serta peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan sistem/metode. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Polda Sultra telah meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan:

a. peningkatan ....

- a. peningkatan pemahaman terkait Program Prioritas Kapolri;
  - b. melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) baik bidang operasional maupun bidang pembinaan;
  - c. mengirimkan personil dalam kegiatan pelatihan maupun kejuruan pada fungsi-fungsi kepolisian;
  - d. peningkatan kualitas personil Polda Sultra dengan memberikan dukungan kepada personil yang akan melanjutkan pendidikan pengembangan Polri maupun pendidikan umum seperti S1, S2 dan S3.
2. sumber daya keuangan

Dukungan anggaran untuk indikator persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra terdapat dalam DIPA Polda Sultra pada program dukungan manajemen dengan pagu program Dukma sebesar Rp. 527.314.672.000,-, realisasi sebesar Rp. 523.245.955.678,- atau terealisasi sebesar 99,23%.

**TABEL**  
**TEFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFESIENSI
<b>Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani</b>					
1	Dukungan manajemen	Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra	104.6	99.23	5.37

*Tingkat efisiensi = capaian kinerja – realisasi anggaran*

Dalam penggunaan sumber daya secara efisien, Polda Sultra selalu mengoptimalkan penggunaan anggaran, sarana prasana dan SDM dalam melaksanakan tugas khususnya dalam bidang pelayanan dalam rangka mencapai target kinerja. Polda Sultra selalu mengoptimalkan personel yang ada, penggunaan anggaran dan sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas khususnya pada bidang hukum dalam rangka mencapai target kinerja.

Ada .....

Ada beberapa analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Polda Sultra yaitu:

1. mengikuti Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan sosialisasi masalah hukum yang dilaksanakan oleh Divkum Mabes Polri;
2. personel yang akan melakukan pendampingan hukum harus profesional dan mengetahui/memahami aturan tentang perkara yang akan dihadapi.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Polda Sultra T.A. 2024 sebesar Rp. 1.226.125.297.000,-, dengan realisasi anggaran berdasarkan data aplikasi Omspan Kemenkeu per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.213.908.925.623,- atau terealisasi sebesar 99,00%. Adapun rincian alokasi pagu Polda Sultra dan realisasinya adalah sebagai berikut:

1. Rincian realisasi anggaran per jenis belanja:

NO	PERJENIS BELANJA / PERSUMBER DANA	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	51 BELANJA PEGAWAI	666.062.636.000	662.852.315.659	99,52%	3.210.320.341	0,48%
2	52 BELANJA BARANG	529.601.942.000	520.828.814.032	98,34%	8.773.127.968	1,66%
3	53 BELANJA MODAL	30.460.719.000	30.227.795.932	99,24%	232.923.068	0,76%
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>1.226.125.297.000</b>	<b>1.213.908.925.623</b>	<b>99,00%</b>	<b>12.216.371.377</b>	<b>1,00%</b>

2. Rincian realisasi anggaran per program:

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	060BD-Program Profesionalisme SDM Polri	42.692.188.000	42.323.923.935	99,14%	368.264.065	0,86%
2	060BI-Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	72.979.158.000	72.725.893.417	99,65%	253.264.583	0,35%
3	060BP-Program Modernisasi Alarmsus dan Sarana Prasarana Polri	136.164.271.000	133.323.029.695	97,91%	2.841.241.305	2,09%
4	060BQ-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	446.975.008.000	442.290.122.898	98,95%	4.684.885.102	1,05%
5	060WA-Program Dukungan Manajemen	527.314.672.000	523.245.955.678	99,23%	4.068.716.322	0,77%
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>1.226.125.297.000</b>	<b>1.213.908.925.623</b>	<b>99,00%</b>	<b>12.216.371.377</b>	<b>1,00%</b>

3. Rincian realisasi anggaran per sumber anggaran:

NO	PERSUMBER DANA	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	BADAN LAYANAN UMUM	37.194.453.000	36.228.490.944	97,40%	965.962.056	2,597%
2	HLDN	144.057.156.000	141.249.584.575	98,05%	2.807.571.425	1,949%
3	PNBP	54.394.780.000	54.175.106.553	99,60%	219.673.447	0,404%
4	RUPIAH MURNI	963.047.135.000	954.854.308.508	99,15%	8.192.826.492	0,851%
5	Surat Berharga Syariah Negara	27.431.773.000	27.401.435.043	99,89%	30.337.957	0,111%
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>1.226.125.297.000</b>	<b>1.213.908.925.623</b>	<b>99,00%</b>	<b>12.216.371.377</b>	<b>1,00%</b>

4. Rincian....

#### 4. Rincian realisasi anggaran per Satker:

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	BID TIK POLDA SULTRA	7.229.547.000	7.131.753.607	98,65%	97.793.393	1,35%
2	BIDDOKKES POLDA SULTRA	14.878.459.000	14.872.224.396	99,96%	6.234.604	0,04%
3	BIDHUMAS POLDA	4.175.852.000	4.173.539.625	99,94%	2.312.375	0,06%
4	BIDKEU POLDA SULTRA	8.225.586.000	8.223.440.395	99,97%	2.145.605	0,03%
5	BIDKUM POLDA SULTRA	2.254.947.000	2.254.940.269	100%	6.731	0,00%
6	BIDPROPAM POLDA SULTRA	9.048.567.000	9.047.745.500	99,99%	821.500	0,01%
7	DITBINMAS POLDA SULTRA	4.337.648.000	4.262.251.041	98,26%	75.396.959	1,74%
8	DITINTELMAS POLDA SULTRA	25.594.398.000	25.592.769.015	99,99%	1.628.985	0,01%
9	DITLANTAS POLDA SULTRA	18.216.820.000	18.216.783.953	100%	36.047	0,00%
10	DITPAMOBVIT POLDA SULTRA	29.386.675.000	29.314.689.934	99,76%	71.985.066	0,24%
11	DITPOLAIRUD POLDA SULTRA	19.873.045.000	19.867.880.040	99,97%	5.164.960	0,03%
12	DITRESKRIMSUS POLDA SULTRA	16.727.295.000	16.726.080.457	99,99%	1.214.543	0,01%
13	DITRESKRIMUM POLDA SULTRA	15.288.382.000	15.268.127.386	99,87%	20.254.614	0,13%
14	DITRESNARKOBA POLDA SULTRA	14.023.506.000	14.019.373.599	99,97%	4.132.401	0,03%
15	DITSAMAPTA POLDA SULTRA	18.645.295.000	18.642.975.250	99,99%	2.319.750	0,01%
16	ITWASDA POLDA SULTRA	6.420.713.000	6.365.307.877	99,14%	55.405.123	0,86%
17	POLRES BAU-BAU	58.311.227.000	57.779.147.830	99,09%	532.079.170	0,91%
18	POLRES BOMBANA	41.311.114.000	40.925.466.325	99,07%	385.647.675	0,93%
19	POLRES BUTON	46.058.719.000	45.721.653.992	99,27%	337.065.008	0,73%
20	POLRES BUTON TENGAH	30.295.893.000	30.255.668.907	99,87%	40.224.093	0,13%
21	POLRES BUTON UTARA	30.887.106.000	30.825.471.066	99,80%	61.634.934	0,20%
22	POLRES KOLAKA	56.876.713.000	56.584.728.579	99,49%	291.984.421	0,51%
23	POLRES KOLAKA TIMUR	34.120.561.000	31.153.916.082	91,31%	2.966.644.918	8,69%
24	POLRES KOLAKA UTARA	40.873.571.000	40.740.612.594	99,67%	132.958.406	0,33%
25	POLRES KONAWA	53.759.642.000	53.435.099.967	99,40%	324.542.033	0,60%
26	POLRES KONAWA SELATAN	57.136.119.000	56.648.971.749	99,15%	487.147.251	0,85%
27	POLRES KONAWA UTARA	32.741.300.000	30.934.706.635	94,48%	1.806.593.365	5,52%
28	POLRES MUNA	63.210.661.000	61.656.318.677	97,54%	1.554.342.323	2,46%
29	POLRES WAKATOBI	36.742.514.000	36.646.201.437	99,74%	96.312.563	0,26%
30	POLRESTA KENDARI	109.223.371.000	108.567.547.713	99,40%	655.823.287	0,60%
31	RO SDM POLDA SULTRA	24.828.208.000	24.459.960.841	98,52%	368.247.159	1,48%
32	ROLOG POLDA SULTRA	66.662.118.000	66.502.817.781	99,76%	159.300.219	0,24%
33	ROOPS POLDA SULTRA	60.723.709.000	60.661.779.539	99,90%	61.929.461	0,10%
34	RORENA POLDA SULTRA	4.990.080.000	4.986.605.097	99,93%	3.474.903	0,07%
35	RUMKIT BHAYANGKARA KENDARI	43.655.942.000	42.488.423.689	97,33%	1.167.518.311	2,67%
36	SATBRIMOB POLDA SULTRA	82.697.364.000	82.696.928.635	100%	435.365	0,00%
37	SPN POLDA SULTRA	19.654.061.000	19.654.037.094	100%	23.906	0,00%
38	SPRIPIM POLDA SULTRA	7.922.506.000	7.892.494.894	99,62%	30.011.106	0,38%
39	YANMA POLDA SULTRA	9.116.063.000	8.710.484.156	95,55%	405.578.844	4,45%
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>1.226.125.297.000</b>	<b>1.213.908.925.623</b>	<b>99,00%</b>	<b>12.216.371.377</b>	<b>1,00%</b>



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018, tugas pokok Polri adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Polda bertugas:

- a. melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polda Sultra berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 – 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja Kapolda Sultra dengan Kapolri maupun Rencana Strategis (Renstra) Polda Sultra tahun 2020 - 2024;

2. berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM yang profesional, bermoral dan modern, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan Polri selaku pemelihara Kamtibmas dan pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta penegak hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut maka pada tahun mendatang Polda Sultra akan melakukan berbagai langkah-langkah koordinasi dengan instansi.....



instansi/lembaga terkait Tupoksinya melalui berbagai kebijakan yang mendukung bagi terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan di wilayah Polda Sultra;

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polda Sultra tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Polda Sultra selama tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran;
4. hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung dan dukungan masyarakat. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Polda Sultra memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam memelihara Kamtibmas di wilayah hukum Polda Sultra secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat sebagai bagian integral dari pembaharuan reformasi dan birokrasi Polri.

## **B. LANGKAH POLDA SULTRA KE DEPAN**

1. perlunya komitmen dari seluruh personel Polda Sultra khususnya para penentu kebijakan dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan reformasi birokrasi Polri sehingga tidak hanya menjadi wacana pergulatan dan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat;
2. diperlukan terobosan baru yang kreatif dan inovatif agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “*top down*” (atas ke bawah) menjadi “*bottom up*” (bawah ke atas) sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi serta pembuatan produk perencanaan yang *visible*, objektif, mengacu pada perkiraan intelijen dan situasi Kamtibmas yang ada;

3. agar .....

3. agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi akan ditingkatkan secara pro aktif, monitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
4. agar implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) benar-benar aktif, perlu adanya sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan/utuh, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *out put* maupun *out come* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut kinerja Polda Sultra yang dibiayai dari APBN benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel;
5. upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah, masyarakat dan *civil society*;
6. pemberdayaan aparaturnya pengawasan, baik aparaturnya pengawasan internal Satker/Subsatker maupun pengawasan oleh inspektorat pengawasan daerah yang didukung oleh pengawas eksternal yang mampu menjamin terlaksananya seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana maupun anggaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien;
7. meningkatkan pengawasan dalam penggunaan anggaran kepada Satker dan Jajaran serta melakukan supervisi dan asistensi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester ke Satker dan Jajaran yang realisasi anggarannya masih rendah atau tidak optimal, efisien dan akuntabel.

Kendari, Februari 2025

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**



**DWI IRIANTO, S.I.K., M.Si.**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**



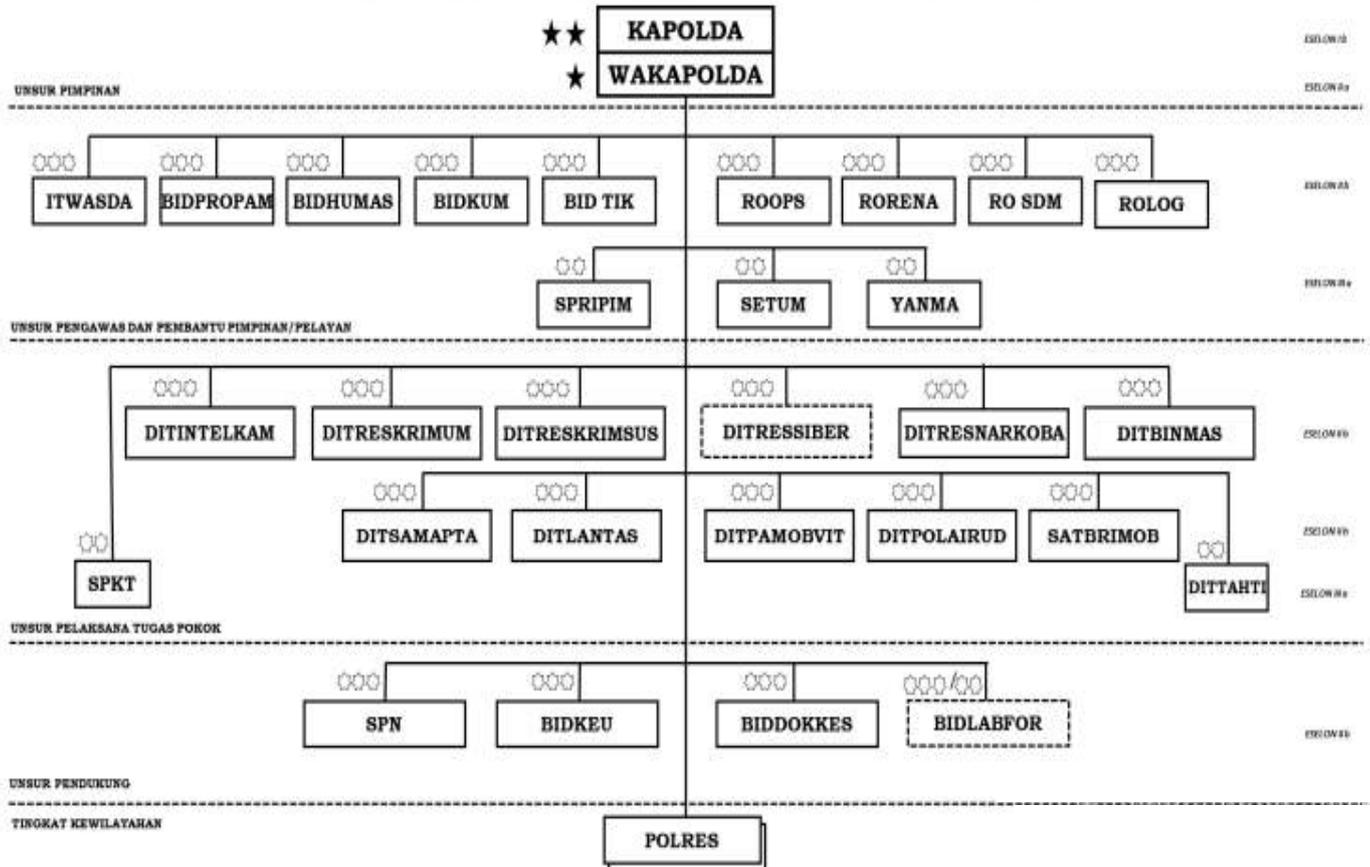
L/





# PERJANJIAN KINERJA 2024

## STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE A





# **SPRIN DAN DOKUMENTASI**





# DOKUMENTASI PENYUSUNAN LKIP TAHUN 2024



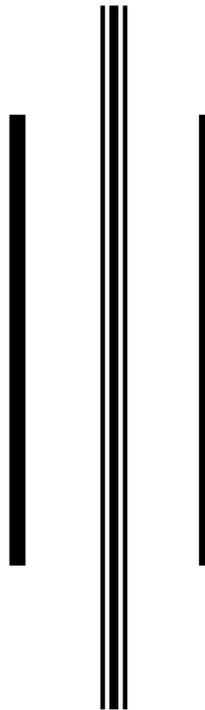


## DOKUMENTASI PELAKSANAAN REVIU OLEH TIM REVIU ITWASDA POLDA SULTRA





# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) POLDA SULTRA TAHUN 2024**



Kendari, Februari 2025